

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS KINERJA ORGANISASI PUBLIK PADA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI DI KOTA TALUK KUANTAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**Sisi Lasmini Jaksi
NPM : 157110198**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2019**

ANALISIS KINERJA ORGANISASI PUBLIK PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DI KOTA TALUK KUANTAN

ABSTRAK

Oleh
Sisi Lasmini Jaksi

Kata Kunci : Kinerja Organisasi Publik, Pemadam Kebakaran;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan. Indikator penilaian yang dipergunakan meliputi Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Tipe penelitian ini adalah survey diskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektifitas keberadaan tujuan pada lokasi penelitian. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 15 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisa data yang dipergunakan adalah menggunakan teknik skor dengan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan berada pada kategori penilaian Baik. Faktor penghambatnya adalah jarak tempuh yang jauh, sehingga pemadam kebakaran selalu terlambat datang ke lokasi kebakaran. Hal ini terjadi karena jumlah pos pemadam kebakaran di Kabupaten Kuantan Singingi hanya ada satu, sementara Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 Kecamatan. Kemudian terbatasnya biaya yang dimiliki oleh dinas pemadam kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga dinas pemadam kebakaran belum bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi mengenai bahaya dan dampak terjadinya kebakaran. Dan jumlah petugas pemadam kebakaran yang ada di dinas pemadam kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang memadai. Petugas yang ada hanya 30 orang, dengan jumlah armada 7 unit. Sedangkan untuk satu armada membutuhkan 6 orang petugas, sehingga masih kekurangan 12 orang petugas Damkar di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi.

**THE ANALYSIS OF PERFORMANCE OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN
THE FIRE OF DEPARTMENT EXTINGUISHERS, DISTRICT KUANTAN
DISTRICT IN TALUK KUANTAN CITY**

ABSTRACT

By
Sisi Lasmini Jaksi

Keywords: Performance of Public Organizations, Fire Fighting;

This study aims to determine and analyze the Performance of Public Organizations at the Kuantan Singingi Fire Department in Taluk Kuantan City. The assessment indicators used include Productivity, Service Quality, Responsibility, and Accountability. This type of research is a descriptive survey, which prioritizes the questionnaire as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions and objectivity of the existence of objectives at the research location. The population and sample in this study were 15 people. Types and data collection techniques used consist of, primary data collected using questionnaire and interview lists and secondary data collected using observation and documentation techniques. While the data analysis technique used is to use a score technique with a frequency table tool. Based on this analysis technique the researchers assessed and concluded that the Analysis of Public Organization Performance at the Fire Service Office in Kuantan Singingi District in Taluk Kuantan City was in the Good rating category. The inhibiting factor is the distance traveled so that the fire department is always late coming to the location of the fire. This happened because there were only one fire station in Kuantan Singingi District, while Kuantan Singingi District had 15 Districts. Then the cost is limited by the Kuantan Singingi fire department, so that the fire department has not been able to provide information to the community in Kuantan Singingi Regency regarding the danger and impact of fires. And the number of firefighters in the Kuantan Singingi fire department is still inadequate. There are only 30 officers, with a fleet of 7 units. Whereas for one fleet, it needs 6 officers, so there are still 12 Damkar officers in the Kuantan Singingi Fire Department.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul “**Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi Di Kota Taluk Kuantan**”. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang selalu memberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.

4. Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II sekaligus Sekretaris Program Studi Administrasi Publik, yang juga turut memberikan motivasi serta membimbing penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
6. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
7. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian serta memberikan informasi yang akurat serta respon yang sangat baik.
8. Kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda Novriyon dan Ibunda Roslawati yang telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau.
9. Rekan-rekan Administrasi Publik angkatan 2015 yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama perkuliahan ini.

Dalam penyusunan naskah skripsi ini, banyak hambatan dan tantangan yang penulis temui. Oleh karena itu, apabila pembaca menemukan kesalahan dan kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna koreksi dan penyempurnaan skripsi ini ke depannya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 18 November 2019
Penulis
Ttd.

Sisi Lasmini Jaksi



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	25
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	26
A. Studi Kepustakaan.....	26
1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik.....	26
2. Konsep Organisasi	33
3. Konsep Manajemen.....	36
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	39
5. Konsep Kinerja	40
6. Konsep Kinerja Organisasi	43
B. Kerangka Pikir	48
C. Konsep Operasional	49
D. Operasional Variabel.....	51
E. Teknik Pengukuran	53
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Tipe Penelitian	56
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Populasi dan Sampel	57
D. Teknik Penarikan Sampel	58
E. Jenis dan Sumber Data	59
F. Teknik Pengumpulan Data.....	59
G. Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	61
A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	61
1. Keadaan Geografis Kabupaten Kuantan Singingi.....	61

2. Topografi.....	62
3. Geologi.....	63
4. Iklim.....	63
5. Hidrografi.....	63
6. Visi dan Misi.....	64
B. Gambaran Umum Dinas Pemadam Kebakaran.....	65
1. Sejarah Pemadam Kebakaran Kuantan Singingi.....	65
2. Visi dan Misi.....	66
3. Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran.....	66
4. Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran.....	67
5. Program Kerja Dinas Pemadam Kebakaran.....	70
6. Agenda Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran.....	71
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Identitas Responden.....	72
1. Jenis Kelamin.....	72
2. Tingkat Pendidikan.....	73
3. Tingkat Usia.....	74
B. Hasil Penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi Di Kota Taluk Kuantan.....	75
1. Produktivitas.....	75
2. Kualitas Pelayanan.....	79
3. Responsibilitas.....	83
4. Akuntabilitas.....	87
C. Faktor Penghambat Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi Di Kota Taluk Kuantan.....	93
BAB VI PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	98
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pramong Praja Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Singingi.....	13
I.2 : Nama-Nama Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi...	16
I.3 : Laporan Operasional Penanggulangan Kebakaran (Hutan)	19
I.4 : Laporan Operasional Penanggulangan Kebakaran (Gedung).....	20
II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan.....	52
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi Di Kota Taluk Kuantan.....	58
V.1 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan berdasarkan Jenis Kelamin.....	72
V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan berdasarkan Tingkat Pendidikan	73
V.3 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan berdasarkan Tingkat Usia.....	74
V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Mengenai Indikator Produktivitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan	76

V.5	: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Mengenai Indikator Produktivitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan	76
V.6	: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Mengenai Indikator Kualitas Pelayanan terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan	80
V.7	: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Mengenai Indikator Kualitas Pelayanan terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan	80
V.8	: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Mengenai Indikator Responsibilitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan	84
V.9	: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Mengenai Indikator Responsibilitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan	84
V.10	: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Mengenai Indikator Akuntabilitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan	88
V.11	: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Mengenai Indikator Akuntabilitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan	88
V.12	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan	49
IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner Untuk Responden Pegawai tentang Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan	101
2. Daftar Wawancara Penelitian Untuk Kabid Pemadam Kebakaran tentang Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan	109
3. Daftar Wawancara Penelitian Untuk Komandan Regu tentang Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan	112
4. Daftar Telly Penelitian tentang Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan.....	115
5. Dokumentasi Penelitian tentang Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan.....	116
6. SK Tim Pembimbing.....	132
7. SK Tim Penguji	133
8. Surat Keterangan Penelitian Dari Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan	134

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sisi Lasmini Jaksi
NPM : 157110198
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 November 2019
Pelaku Pernyataan,

Sisi Lasmini Jaksi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang sepanjang sejarahnya selalu hidup berkelompok. Kehidupan berkelompok ini didasari karena setiap orang sebagai makhluk mempunyai kebutuhan bersama atau kebutuhan sosial. Kebutuhan manusia meningkat seiring bertambahnya usia dan berkembangnya zaman. Kebutuhan manusia modern lebih banyak dari pada kebutuhan fisik dan psikologi, baik secara individual maupun kelompok. Jumlah kelompok juga semakin banyak. Setiap orang memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, agar kebutuhannya terpenuhi maka membentuk organisasi.

Sementara itu organisasi menurut Siagian (2003;6) didefinisikan sebagai bagian setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Manajemen menurut Terry didefinisikan sebagai proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula. (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;78).

Dalam arti luas, Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas

rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 2003:2). Dari batasan ini dapat diungkapkan ide pokok, yakni sebagai berikut:

- a. Administrasi sebagai rangkaian kegiatan
- b. Kegiatan itu dilaksanakan dalam kerangka kerja sama kelompok
- c. Kerangka kerja sama kelompok itu dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama.

Berbicara masalah administrasi tentunya tidak lepas dari konsep manajemen yang mana manajemen merupakan inti dari administrasi. Menurut Siagian (2003;5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Menurut Hasibuan (2012;2) manajemen merupakan ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Siagian (2014;2) mendefinisikan administrasi sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sebuah organisasi merupakan wadah bagi orang-orang didalamnya untuk mencapai tujuan dengan segala sesuatu sumber dayanya yang bersifat terbatas. Untuk itu sangat diperlukan kegiatan manajerial untuk mengatur sumber

daya-sumber daya yang terbatas tersebut dan bagaimana tujuan-tujuan organisasi tersebut bisa tercapai.

Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upaya-upaya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang ditetapkan sebelumnya.

Manajemen dibutuhkan oleh semua Organisasi, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen (dalam Hasibuan, 2012;6).

1. *Untuk mencapai tujuan.* Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. *Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.* Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
3. *Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.* Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyaknya cara yang berbeda. Salah satu cara umum adalah efisien dan efektifitas.

Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan indikator kinerja.

Menurut Dwiyanto (dalam Pasolong, 2016;182) penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya.

Umpan balik dari kinerja ini akan memotivasi karyawan untuk bekerja, mengembangkan kemampuan pribadi, dan meningkatkan kemampuan dimasa yang akan datang. Penilaian ini mengukur kinerja karyawan baik dari aspek kualitatif maupun kuantitatif.

Menurut Schuler (dalam Pasolong, 2016:182), kinerja diartikan sebagai suatu proses penilaian kinerja. Dalam pandangan beliau bahwa proses penilaian kinerja dapat digunakan pendekatan komparatif, standar-standar absolut, pendekatan tujuan, indeks yang bersifat langsung atau objektif.

Agar penilaian kinerja tersebut efektif maka pelaksanaan penilaian kinerja harus sesuai dengan proses dan prosedur yang baku agar memberi dampak positif bagi peningkatan kinerja karyawan yang pada akhirnya memberikan dampak pada organisasi secara keseluruhan.

Sejak dibentuk, organisasi ini telah banyak mengalami evolusi. Nama Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) sempat dipakai pada periode 1969 – 1974. Tidak sebatas nama baru, tapi tugasnya juga bertambah dengan dibentuknya Bagian Pencegahan. Dengan begitu organisasi juga punya tanggung jawab melakukan tindakan-tindakan preventif bencana kebakaran. Perubahan nama kembali dilakukan pada periode 1975–1980. Saat itu kata “pemadam” dihapuskan dengan tujuan memperluas tugas-tugas organisasi. Sehingga menjadi Dinas

Kebakaran. Dalam praktiknya di setiap daerah di Indonesia, organisasi ini berada langsung di bawah pemerintah kota atau kabupaten.

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 24 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kedua Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.

Oleh karena itulah daerah didorong membentuk lembaga yang membidangi urusan bencana dan kebakaran. Pemadam kebakaran disingkat Damkar. *Branwir* (dari Bahasa Belanda "*Brandweer*"), atau PMK adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran atau melakukan pemadaman, juga dilatih untuk menyelamatkan korban-korban bencana seperti kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, banjir, gempa bumi, dan lain-lain.

Moto yang dipakai *Pantang Pulang Sebelum Padam*. Sedangkan tugas pokoknya yaitu:

1. Pencegahan Kebakaran
2. Pemadaman Kebakaran, dan
3. Penyelamatan jiwa dari ancaman kebakaran dan bencana lain.

Dilain hal, mereka juga ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas penyelamatan yang tidak menyangkut adanya kebakaran seperti pengevakuasian

sarang tawon, menyelamatkan korban bunuh diri, menyelamatkan orang atau hewan yang terjebak, menanggulangi pohon tumbang, dan lain-lain. Pemadam kebakaran juga terkadang ditugaskan untuk memberi sosialisasi dan pendidikan kepada rakyat sipil tentang kebakaran dan cara menanggapi.ada Undang-undang tentang kebakaran yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah susun (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992) Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Peraturan pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan UUBG nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan yaitu :

Visi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sarana organisasi yang ingin dicapai berdasarkan uraian tersebut diatas maka Satuan Polisi Pamong

Praja, Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Kabupaten Kuantan Singingi Menetapkan Visinya, sebagai berikut :

“Turwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Yang Profesional Dalam Menciptakan Keamanan, Keselamatan Dan Ketentraman Dalam Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi”.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan dan sasaran organisasi dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan misinya, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
- b. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Mendorong masyarakat serta dunia usaha dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Pemadam kebakaran polisi pamong praja Kabupaten Kuansing yaitu :

Kantor Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi tanggung jawab dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, menegakkan perda, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan kepada warganya dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

Dalam mewujudkan rasa aman serta memberikan perlindungan kepada warga kabupaten kuantan singingi tersebut, Kantor Polisi Pamong Praja, sesuai dengan yang diatur dalam perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi, yang mempunyai Tugas Pokok, Yakni :

- a) Menjaga ketentraman dan Ketertiban Daerah
- b) Menegakkan Perda
- c) Pencegahan Kebakaran
- d) Pemadaman Kebakaran
- e) Penyelamatan jiwa dari ancaman kebakaran dan bencana lainnya.

Bagian pemadaman kebakaran Satpol-PP Kabupaten Kuantan singingi menetapkan 3 Regu pemadam kebakaran, masing-masing Regu bertugas 12 jam sehari dengan giliran shift. Setiap regu beranggotakan 6 orang. Adapun perincian tugas pokok dan fungsi dari pemadam kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Komandan Regu :
 - a. Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan tugas regu setiap pergantian piket.
 - b. Melaksanakan koordinasi saat terjadinya kebakaran

- c. Menyusun strategi dan taktik pada saat terjadi kebakaran
- d. Melaksanakan koordinasi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam tugas
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala kantor melalui kepala seksi ketentraman, ketertiban dan Pemadam Kebakaran.
- f. Melakukan tugas-tugas pembantuan
- g. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan.

2. Operator Mobil Pemadam Kebakaran (MPK)

- a. Mengoperasikan mobil Pemadam Kebakaran (MPK) utama pada saat kejadian kebakaran.
- b. Melaksanakan Perawatan Mobil Pemadam Kebakaran (MPK) dan peralatan yang melekat agar selalu dalam keadaan siap pakai.
- c. Melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan ingan yang terjadi pada MPK
- d. Melakukan Tugas-tugas pembantuan
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan

3. Juru Padam (*Nozzle Man*)

- a. Memelihara peralatan pemadam kebakaran yaitu : Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Nozzle, Selang Buang dan Seames
- b. Menyiapkan kebutuhan peralatan pada saat akan melaksanakan penanggulangan kebakaran
- c. Melaksanakan penggulangan kebakaran dari krentangan awal hingga penanggualangan kembali selang buang

- d. Melaksanakan pemeriksaan berkala dan mengkoordinasikan kepada komandan regu dan kondisi peralatan yang menjadi tanggung jawabnya setia pergantian piket
- e. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan

4. Juru Penyelamat

- a. Melaksanakan perawatan pendukung pemadam kebakaran yaitu pesawat telepon, Handy Talky, Kampak, Baju Tahan api
- b. Menyiapkan baju tahan api apabila diperlukan
- c. Melaksanakan pemeriksaan berkala dan mengkoordinasikan kepada komandan regu atas kondisi yang menjadi tanggung jawan setiap pergantian piket
- d. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pada Satpol-PP sebagai Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana diatur dalam Perda No. 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kantor Satuan Pamong Praja sebagai Pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari:

- a. Kepala Kantor
- b. Kasubbag Tata Usaha
- c. Kepala seksi
 - Kasi Bina Personil
 - Kasi Ketentraman, Ketertiba, Dan Pemadam Kebakaran

- Kasi Penegakan Fungsional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Pegawai Kantor serta anggota Satpol-PP dan Petugas Pemadam kebakaran.

Namun, Dinas pemadam kebakaran selalu mendapatkan berbagai macam pertanyaan dari masyarakat, sebenarnya apa kerja dinas pemadam kebakaran kota taluk kuantan? menjawab pertanyaan ini sebenarnya banyak kegiatan yang harus dilakukan walau masih serba keterbatasan baik itu sarana dan prasarana, contoh kecil yaitu, memberikan penyuluhan baik yang dikelurahan sampai pada gedung-gedung bertingkat, baik itu tingkat kabupaten dan kecamatan yang ada di kuansing “Pencegahan kebakaran, pemadam kebakaran, penyelamatan jiwa dari bahaya kebakaran dan perlindungan jiwa, harta benda dari kebakaran serta bencana lainnya seperti banjir, gempa bumi merupakan salah satu tugas pokok pemadam kebakaran kota taluk kuantan.

Namun dari yang saya lihat dilapangan dinas Pemadam Kebakarandan Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi hanya ada total 7 Armada (4 unit Fuso, 1 Unit komando, 2 colt diesel). Namun yang Beroperasi hanya 5 Armada dalam satu Kabupaten dengan 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Dimana seharusnya setiap Kecamatan memiliki minimal 1 pos Pemadam kebakaran dan 2 Armada.

Pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di kota Taluk Kuantan yang demikian pesat akan memicu Taluk kuantan menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi. Potensi kota Taluk kuantan merupakan ancaman yang cukup tinggi kemungkinan akan terjadinya bahaya bencana alam khususnya

kebakaran,hal tersebut karena sudah semakin padatnya pembangunan dimana-mana yang dapat memicu mudah terjadinya kebakaran.

Oleh karena itu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di kota Taluk Kuantan yang demikian pesat akan memicu Taluk Kuantan menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi. Potensi kota Taluk Kuantan merupakan ancaman yang cukup tinggi kemungkinan akan terjadinya bahaya bencana alam khususnya kebakaran,hal tersebut karena sudah semakin padatnya pembangunan dimana-mana yang dapat memicu mudah terjadinya kebakaran .

Hal ini memang sudah ditandai dengan sudah sangat banyaknya bangunan-bangunan besar dan bertingkat, baik itu perkantoran, rumah sakit biasa maupun rumah sakit pemerintah, hotel-hotel, plaza super market, pusat-pusat perbelanjaan, ruko-ruko yang berjejeran disepanjang jalan kota taluk kuantan. Namun tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya kawasan-kawasan perumahan dan pemukiman padat hunian.

Untuk penanggulangan kebakaran ada beberapa yang harus dipersiapkan oleh dinas pemadam kebakaran terlebih dahulu alat adanya pemeriksaan alat pemadam kebakaran aga pada saat petugas melakukan kegiatan tidak terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan.

Namun satu hal yang menarik,pembangunan gedung besar dan bertingkat belum semuanya dengan baik.salah satunya yang terlupakan atau yang tak terfikirkan adalah pembangunan disektor penanggulangan,pencegahan terhadap bahaya kebakaran khususnya bagi pemilik pengelola serta pemakai gedung besar dan bertingkat,dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi kepada pemukiman

masyarakat. Penanggulangan bahaya kebakaran pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap warga masyarakat bersama, baik kepentingan individu maupun kepentingan umum serta pemerintahan kota Taluk Kuantan yang harus dilaksanakan secara preventif dan refresif.

Tabell.1: Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi.

JUDUL SOP	NOMOR SOP
SEKRETARIAT	
1. SUBBAGIAN UMUM	
- Administrasi surat masuk	4.17.Sekre.Um.01
- Administrasi surat keluar	4.17.Sekre.Um.02
- Usulan kenaikan pangkat	4.17.Sekre.Um.03
2. SUBBAGIAN PROGRAM	
- Penyusunan prioritas plafon anggaran (PASS)	4.17.Sekre.Prog.04
- Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA)	4.17.Sekre.Prog.05
- Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LKJIP)	4.17.Sekre.Prog.06
- Penyusunan rencana kerja (RENJA)	4.17.Sekre.Prog.07
3. SUBBAGIAN KEUANGAN	
- Pertanggung jawaban bendahara pengeluaran	4.17.Sekre.Keu.08
- Penatausahaan penerimaan SP2D UP/GU/TU	4.17.Sekre.Keu.09
- Pertanggung jawaban penanggulangan tambahan uang (TU)	4.17.Sekre.Keu.10
BIDANG-BIDANG	
1. BIDANG PENEGAKAN PERDA	
- Pembinaan dan pemberdayaan PPNS	
2. BIDANG OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	
- Patroli	4.17.Sekre.PPNS.11
3. BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
- Pemadam dan pengendalian	4.17.Ops.SDA.12
- Pencegahan kebakaran	
- Penyelamatan korban kebakaran	
4. BIDANG BINA SATLINMAS DAN PENANGGULANGAN BENCANA	
- Monitoring daerah rawan bencana	4.17.Damkar.PP.13
- Kaji cepat dan tepat terhadap lokasi, Kerusakan dan kerugian bencana	4.17.Damkar.PK.14
- Koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan bencana.	4.17.Damkar.PKK.15 4.17.Linmas.Datin.16 4.17.Linmas.Penang.17 4.17.Linmas.Mob.18

Sumber: SOP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2018.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada secretariat terdapat tiga subbagian, dan pada bidang-bidang tertentu terdapat empat bidang. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan tugas pemadam kebakaran yaitu: Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran:

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam SOP ini adalah pemeriksaan alat pemadam api ringan (APAR) yang dilaksanakan oleh anggota pemadam kebakaran.

2. Persiapan Administrasi Dan Peralatan

- a. Surat perintah tugas
- b. Data objek pemeriksaan
- c. Alat ukur/timbangan

3. Pelaksanaan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

- a. Petugas pelaksana pemeriksaan berangkat menuju sasaran. selama melakukan pemeriksaan, petugas pelaksana berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, rencana penegasan dan penjabaran tugas yang telah disusun serta dilaporkan perkembangan hasil kepada kepala saksi pencegahan kebakaran.
- b. Waktu Pelaksanaan.
Alokasi waktu untuk pengawasan disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas objek pemeriksaan.
- c. Petugas pelaksanaan pemeriksaan kembali ke kantor setelah seluruh badan keterangan dan informasi yang dibutuhkan telah dihimpun/didapat

maka petugas pelaksana pemeriksaan dapat kembali ke kantor satpol PP kabupatenkuantan singingi membuat laporan hasil penugasan.

- d. Seluruh dan keterangan yang sudah dihimpun selama pelaksanaan pemeriksaan disusun dalam bentuk laporan penugasan.
- e. Setelah membuat laporan penugasan,petugas pelaksana membuat konsep rekomendasi untuk dikoreksi oleh kepala seksi pencegahan,setalah mendapat persetujuan dari kepala bidang pemadam kebakaran maka rekomendasi tersebut disajikan kepada sekretaris dan satpol PP.
- f. Tata cara penulisan laporan merujuk kepada petunjuk administrasi yang ada. Laporan dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan lebih lanjut.

Namun selain itu ada ketentuan tindakan yang harus dilaksanakan agar pada saat pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Dinas pemadam kebakaran merupakan instansi pemerintah yang juga memiliki kriteria yang menentukan baik tidaknya kinerja mereka dalam melaksanakan kewajibannya yaitu melindungi keselamatan baik jiwa, harta dan benda masyarakat pada umumnya ketika terjadinya kebakaran. Semuanya di tentukan oleh petugas operasional yang bekerja dilapangan apakah kinerja mereka sudah baik sehingga menyelamatkan dan melindungi masyarakat umum pada saat terjadinya kebakaran,dan dalam ini harus sepenuhnya bekerja untuk satu kabupaten kuantan singingi yang memiliki 15 kecamatan dan 199 kelurahan yang tersebar.

Badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran melaksanakan standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri dengan konsentrasi

penanggulangan bencana kebakaran. Hal ini diatur dalam Permendagri nomor 62 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri di Kabupaten dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam suatu organisasi publik seperti Dinas Pemadam Kebakaran, adanya tenaga pegawai yang bekerja dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, yang terdiri dari 18 tenaga dalam bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.2: Nama-Nama Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan Operasional
1	Drs.Martono	Pembina TK 1, IV/b	Kabid pemadam kebakaran dan penyelamatan
2	Ahmustari, S.P	Penata TK 1, III/d	Kasi penyelamatan
3	Ganda Vislessa, S.T	Penata Tk 1, III/d	Kasi Pencegahan kebakaran
4	Pujiadi	Penata, III/a	Kasi pemadaman dan pengendalian
5	Indra, S.Sos	Penata muda Tk 1, III/b	Staf penyelamatan
6	Isharyant, S.T	Penata muda, III/a	Staf pemadaman dan pengendalian
7	Erliadi	Pengatur, II/d	Staf pencegahan
8	Burisman	Pengatur, II/d	Danton pleton III
9	Usman	Pengatur, II/d	Mekanik pleton 1
10	Wawan Gunawan	Pengatur, II/c	Danton pleton 1
11	Befli	Pengatur, II/c	Staf penyelamatan
12	Sartono	Pengatur, II/c	Mekanik pleton III
13	Satria Sukma	Pengatur, II/c	Danton pleton 1
14	Darwis	Pengatur, II/c	Danru pleton III
15	Bambang Wijayanto	Pengatur, II/c	Danru pleton I
16	Hasbi	Pengatur, II/c	Danru pleton II
17	Aprius Indra	Pengatur, II/c	Danru pleton II
18	Indra Thomason	Pengatur muda, II/a	Mekanik pleton II

Sumber : Kantor Pemadam Kebakaran Taluk Kuantan 2018.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 18 orang tenaga/pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Taluk Kuantan. Kinerja mereka dalam penyelamatan yang dilakukan oleh pegawai unit pelaksanaan teknis dinas

terhadap pembinaan kualitas kinerja dinas harus baik sesuai dengan suatu pencapaian yang diinginkan. Selanjutnya adapun Program Unggulan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi yaitu antara lain:

1. Peningkatan SDM Internal
2. Penguatan Data dan Administrasi
3. Peningkatan Saran dan Prasarana
4. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Empat program unggulan diatas merupakan suatu tanggungjawab yang harus dicapai. Suatu kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak bisa berdiri sendiri, tapi berhubungan dengan kepuasan kerja yang dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan, skill, pengalaman, dan harus mempunyai keinginan tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui apa sebenarnya pekerjaan mereka. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi haruslah optimal dan sesuai dengan pencapaian suatu keinginan dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi.

Badan penanggulangan bencana dan Pemadam Kebakaran kota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang disingkat dengan BPBPK Kota Taluk Kuantan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 Kabupaten Kuantan Singingi bahwa dalam rangka perlindungan keselamatan perlindungan jiwa dan harta benda masyarakat pengguna lingkungan bangunan dan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, perlu diupayakan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan dalam mewujudkan pelayanan pemerinsaan alat

pemadaman kebakaran secara efektif dan berkelanjutan, perlu peran serta masyarakat melalui pembebanan retribusi.

Adanya konsep manajemen dalam penanggulangan bencana kebakaran yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 dengan manajemen yang dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran di Kota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dan 15 kecamatan yang tersebar.

Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau meminta pihak provinsi mengabulkan yang diusulkan terkait penambahan armada di dinas pemadam kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi mengingat jarak rentang antara kabupaten dengan sejumlah kecamatan dan perdesaan cukup jauh. Namun hingga saat ini permintaan tersebut belum terkabulkan. Padahal masyarakat kuansing sangat membutuhkan penambahan mobil itu.

Saat ini Kabupaten Kuantan Singingi baru memiliki empat unit mobil pemadam kebakaran namun hanya tiga yang layak beroperasi itupun kondisinya memprihatinkan, sebab telah berumur 10 tahun lebih. Minimnya fasilitas yang dimiliki oleh dinas pemadam kebakaran dalam menanggulangi bencana kebakaran sehingga berdampak kepada pelayanan terhadap masyarakat yang terkena korban.

Masyarakat sering mengeluhkan soal mobil damkar yang sering terlambat datang ketika ada kebakaran di sejumlah kecamatan. Seharusnya disetiap kecamatan dibangun kantor untuk damkar ditiap rayon kecamatan, maka dengan begitu perlu adanya penambahan mobil damkar baru.

Selanjutnya adapun laporan operasional penanggulangan kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3: Laporan Operasional Penanggulangan Kebakaran (Hutan).

No	Waktu	Lokasi Kebakaran	Objek Kebakaran	Keterangan
1	01/02 2018	kel.sei jering. kec. kuantan tengah	lahan kosong	Kelalaian manusia
2	14/02/2018	jln.padang bunut sinambekseijeringkeckuantan tengah	lahan kosong	Kesalahan manusia
3	16/02/2018	kebun lado. kec. singingi	lahan perkebunan masyarakat	Kesalahan manusia
4	31/03/2018	Desa sitoraja kari. Kec. Kuantan tengah	Kebun karet masyarakat	Puntung rokok
5	31/03/2018	Rawang belibis TPA Sentajo Raya	Kebun karet masyarakat	Kelalaian manusia
6	06/05/2018	Desa beringin Taluk Kuantan Tengah	Lahan milik masyarakat	Kelalaian Manusia
7	08/05/2018	Sinambek RSUD kel. Sei jering. Kuantan Tengah	Lahan kosong	Membersihkan lahan
8	10/06/2018	Beringin Taluk Kuantan. Kec. Kuantan Tengah	Lahan Perumahan Masyarakat	Kelalaian Manusia
9	05/07/2018	Jl. Rusdi, S. Abram Sinambek, Sei. Jering. Kec. Kuantan Tengah	Lahan kosong	Kelalaian Manusia
10	13/07/2018	Jl.plu Kedundung. Seberang taluk	Kebun karet milik masyarakat	Kelalaian manusia
11	12/08/2018	Desa muara sentajo kec. Sentajo Raya	Kebun karet milik Masyarakat	Putung rokok
12	13/08/2018	Sikijang Baserah kec. Kuantan Hilir	Kebun karet milik Masyarakat	Kelalaian Manusia
13	26/08/2018	Beringin Taluk. Jl. Jalur dua. Kec. Kuantan Tengah	Lahan Kosong	Kelalaian Manusia
14	16/09/2018	Penghijauan kec. Pangian	Lahan Perkebunan masyarakat	Kelalaian Manusia
15	17/09/2018	Kebun Nenas Kec. Kuantan singingi	Lahan kosong	Kelalaian Manusia
16	28/09/2018	Koto peraku. Ke. Cirenti	Lahan Kosong	Kelalaian Manusia

Sumber: Dinas SatpolPP Pemadam Kebakaran Kab.Kuantan Singingi 2018.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 16 kali kebakaran hutan yang telah terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2018. Dan hamper semuanya kebakaran hutan tersebut merupakan akibat ulah manusia baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Selanjunya adapun data laporan kebakaran gedung yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2018 yaitu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel I.4 : Laporan Operasional Penanggulangan Kebakaran (Gedung).

No	Waktu	Lokasi Kebakaran	Objek Kebakaran	Keterangan
1	21/01/2018	Sinambek kel.Sei jering.kec. Kuantan tengah	Flapon garasi	Radiasi akibat petir
2	13/02/2018	Perhentian luas,logas tanah darat (LTD)	1 Unit rumah dan 1 sepeda motor	Konsleting listrik
3	27/02/2018	Pasar baru pangean Kec. pangean	Atap rumah	Konsleting listrik
4	14/03/2018	SPBU sitoraja kari,kec. Kuantan tengah	1 unit mobilproyek	Percikan ApiMemasak
5	15/03/2018	Kampung medam baserah	1 unit rumah	Kompom meledak
6	09/05/2018	Sei.Jering kec.kuantan tengah	Kamar hotel kuansing	Konsleting listrik
7	13/05/2018	Kaantor camat pangean	1 unit rumah	Konsleting listrik
8	01/06/2018	Depan TK pembina Kec Kuantan tengah	1 Unit rumah	Konsleting listrik
9	11/06/2018	Pasar logas kecSingingi	Kios Pasar Logas 11 Pintu	Konsleting listrik
10	23/06/2018	Tobek panjang desa koto. Taluk	3 Unit rumah	Api masak/ tungku
11	22/08/2018	Komplek perkantoran pemda kab. Kuansing	Kantor dinas sosial kab. Kuantan singingi	Konsleting listrik
12	23/08/2018	Komplek perkantoran pemda kab. Kuansing	Kantor dinas sosial kab. Kuantan singingi	Sisa kebakaran
13	16/10/2018	Kasang lubuk jambi Kec. Kuantan mudik	1 unit rumah	Konsleting listrik
14	19/10/2018	Kec. Pucuk Rantau	1 unit Rumah	Konsleting Listrik

Sumber: Dinas Satpol PP Pemadam Kebakaran Kab. Kuantan Singingi 2018.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 14 kali kebakaran gedung yang telah terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2018. Dan sebagian besar kebakaran gedung tersebut merupakan akibat konsleting listrik.

Penanggulangan bencana Pemadam kebakaran yang dilakukan saat ini belum menerapkan sistem Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagaimana dimaksudkan dalam Pemandagri Nomor 69 Tahun 2012 melainkan dengan membangun pos-pos pemadam kebakaran disetiap kecamatan dan menempatkan mobil serta tenaga operasional kebakaran di masing-masing pos yang manajemennya dikendalikan oleh kantor Badan Penanggulangan Bencana dan kebakaran kota taluk kuantan dan beberapa kecamatan yang tersebar. Badan penanggulangan Bencana dan pemadam kebakaran di kota taluk kuantan belum memiliki data potensi daerah yang rawan kebakaran di Kota Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga belum dapat menentukan berapa jumlah dan luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang harus dibentuk.

Kinerja petugas operasional dapat dilihat dalam pelaksanaan kinerja mereka disaat terjadinya kebakaran, dimana instansi memiliki standar waktu yang telah ditentukan dalam melaksanakan tugasnya, untuk yang ditetapkan tugas operasional dapat mempersiapkan terlebih dahulu sesuatu yang berhubungan dengan perlengkapan pemadam kebakaran seperti air, pipa air, mesin pompa, mobil dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar mereka selalu siap ketika menerima informasi dari masyarakat akan terjadinya kebakaran.

Masih sangat kurangnya kepuasan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Perencanaan dari pemerintah kabupaten bahwa akan segera membentuk BPBD untuk Kabupaten/Kota Taluk Kuantan, karena dari 12 kabupaten di Provinsi Riau hanya kuansing yang belum membentuk BPBD, padahal kuansing merupakan suatu daerah yang rawan akan bencana alam seperti banjir, kebakaran lahan, gedung, dan perumahan masyarakat di Kota Taluk Kuantan. Agar mempermudah BPBD Riau untuk melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kepada dinas pemadam kebakaran yang ada dikota taluk kuantan.

Menampung aspirasi masyarakat adalah menerima masukan berupa ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan penanggulangan bencana seperti kebakaran yang sering Tidak dapat diselamatkan. Menetapkan prioritas bahwa keselamatan bencana bagi masyarakat itu sangat penting,karena tugas dari pemadam kebakaran itu sendiri merupakan membantu masyarakat yang mengalami bencana kebakaran gedung atau rumah dari masyarakat yang ada di kota dan kecamatan di taluk kuantan.

Komunikasi dan interaksi diantara stakeholder adalah hubungan antara pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas bagi pegawai kepada masyarakat dikota taluk kuantan maupun daerah kecamatan yang menjadi tugasnya.Keberhasilan operasional dalam sebuah instansi sangat ditentukan oleh seluruh petugas operasional yang bertugas menjalankan seluruh kegiatan pada insatansi tersebut,dengan adanya petugas operasional yang tampil dan cepat tanggap akan tugasnya maka dapat mendorong kegiatan operasonal berjalan

dengan lancar semuanya dapat diwujudkan dengan adanya pegawai yang memiliki kualitas kinerja yang baik.

Dinas pemadam kebakaran banyak mendapat pertanyaan yang tidak baik dari masyarakat, sebenarnya apa kerja dari pemadam kebakaran. Menjawab pertanyaan masyarakat yang seperti ini sebenarnya biasa saja, karena banyak juga kegiatan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran, namun memang terdapat kesalahan karena keterbatasan baik itu sarana dan prasarana, contoh kecil yaitu memberikan penyuguhan baik dikelurahan sampai pada gedung-gedung bertingkat yang ada di kota taluk kuantan atau mungkin di daerah kecamatan yang ada di kabupaten Kuantan Singingi melakukan “Pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan jiwa dari bahaya kebakaran, dan juga harta benda yang mereka miliki, serta juga bencana banjirdangempa bumi merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari pemadam kebakaran di Kota Taluk Kuantan”.

Namun adapun langkah-langkah yang telah diambil atau yang telah dilakukan oleh dinas pemadam kebakaran ini dalam menanggulangi bencana atau bahaya yang terjadi belum begitu mendapatkan hasil yang baik atau kepuasan secara maksimal dari masyarakat di kabupaten kuantan singingi, karena pada kenyataannya masih banyaknya kejadian/musibah kebakaran yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh dinas pemadam kebakaran kota taluk kuantan dan daerah kecamatannya, sehingga kerugian material dan non material tidak dapat diselamatkan.

Setelah peneliti melakukan pengamatan di lapangan, adapun beberapa fenomena yang peneliti temukan di lapangan yaitu sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pemadam kebakaran seperti kendaraan operasional lapangan (armada pemadam kebakaran) masih kurang, yakni hanya ada tiga mobil damkar. Karena dalam Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 telah diatur bahwa setidaknya harus ada 7 mobil Damkar dalam satu kabupaten/kota, dan dalam 1 mobil Damkar terdiri dari 7 personil.
2. Aparatur Pemadam kebakaran serta personil yang ada belum memenuhi standar kualifikasi dan ada beberapa pegawai yang belum memiliki sertifikat damkar. Kemudian jumlah petugas operasional pemadam kebakaran yang ada tidak memadai di Kota Taluk Kuantan, yakni hanya ada 18 personil yang tersebar pada 15 kecamatan.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang ditemui dilapangan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan menarik judul: **“Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimanakah Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan?

2. Apa saja faktor penghambat Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai pengembangan ilmu administrasi publik khususnya mengenai kinerja organisasi publik.
- b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan serta tela'ah bagi pihak dinas pemadam kebakaran dalam meningkatkan kinerja organisasi publik.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak-pihak yang mempunyai minat terhadap penelitian yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam upaya memecahkan masalah penelitian ini, maka penulis mencoba mengemukakan dan menindak pada teori yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sehingga dalam hal tersebut diharapkan dapat memberikan dasar dan arahan bagi penelitian yang dilakukan.

1. Konsep Administrasi

Administrasi adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya, Nawawi (dalam Syafri, 2012;5).

Seperti yang dikatakan oleh Siagian (2014;9) dalam bukunya bahwa administrasi didefinisikan sebagai seluruh proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian yang memberikan batasan administrasi proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilaksanakan oleh tasionalisasi tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna (dalam Zulkifli, 2005:9).

Adapun batasan administrasi menurut Silalahi (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015;19) adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan

mendayagunakan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. dengan adanya pembagian kerja yang terstruktur, organisasi telah menggunakan salah satu prinsip dari *human relation* yaitu *the right men the right place* atau penempatan pegawai sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

Menurut Gie dalam Syafri (2012: 8) menyatakan bahwa administrasi adalah sistem tentang aktifitas kerjasama dari dua orang atau lebih suatu yang tidak terwujud dan tidak bersifat pribadi, sebagian besar mengenal hal hubungan-hubungan dalam kegiatan apa saja, agar kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan secara efektif diperlukan pengaturan yang baik.

Atmosudirjo (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015:17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin dan mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana urusan sekaligus berlangsung didalamnya.

Luther dalam Pasolong (2016:2) mengemukakan bahwa administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal-hal yang dilakukan dengan pencapaian tujuan-tujuan yang ditentukan.

Kemudian menurut Fathoni dalam Sedarmayanti (2001:5) bahwa pengertian administrasi yaitu suatu proses daya upaya yang dilakukan dua orang atau bekerjasama, secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Artinya administrasi itu tidak bisa bekerja sendiri dalam melaksanakan pekerjaannya dan harus sesuai dengan logika dan akal sehat manusia.

Disamping itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang, sehingga menghasilkan tiga pengertian menurut sudut pandangnya masing-masing oleh Ali (2014;20) yaitu:

1. Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan sehingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksudkan tercapai.
2. Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi, dan sebagainya.
3. Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari ketiga definisi diatas, muncul pertanyaan siapakah orang-orang dimaksud ada dalam administrasi secara luas? adapun orang-orang pengisi organisasi yang dimaksud dalam tiga definisi diatas menurut Ali (2014;21) adalah sebagai berikut:

- a. Administrator: orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan
- b. Manajer: orang yang berlangsung memimpin pekerjaan kearah tercapainya hasil yang nyata.

- c. Pembantu Ahli : terdiri atas para ahli dalam setiap bidang, selaku penasihat (*brain-trust*)
- d. Karyawan : para pelaksana dan pekerja yang digerakan oleh manajer untuk berkerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan.

Mulai dari sini lah kita bisa melihat bahwa adminitrasi memiliki ruang lingkup yang bergerak sangat luas dan tidak hanya sebatas proses ketika mengetik surat, pencatatan atau arti sempit lain nya. dan jika diperhatikan lebih seksama, sangat terlihat bahwa administrasi itu tidak hanya hadir sebagai sebuah proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas. Kenapa, Karena begitu spesifik pembahasan administrasi secara meluas dan mencakupi semua unsur yang ada didalamnya baik dari sumber daya manusianya, maupun dari sumber daya organisasi lainnya, dimana semua sumber daya organisasi itu disimpulkan dalam istilah 6M (dalam Zulkifli dan Nurmasari, 2015). Dimana 6M itu adalah sebagai berikut:

- a. *Man*, yang artinya adalah manusia. Dalam organisasi manusia ini dikenal sebagai sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Karena jika sumber daya manusia suatu organisasi itu berkualitas, maka hdiup dari sebuah organsisasi akan berkualitas.
- b. *Money*, artinya uang. Uang yang dimaksud adalah sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala sesuatu pergerakan di dalam organisasi juga membutuhkan finansial.

- c. *Method*, yang artinya adalah metode atau cara. Cara yang dimaksud dalam hal ini adalah segala macam jalan, taktik, strategi dalam membuat sebuah organisasi itu menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- d. *Machine*, yang artinya mesin. Maknanya adalah bahwa mesin yang dimaksud merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran beregerakannya sebuah organisasi.
- e. *Material*, materi, bahan, dalam organisasi. Peralatan yang dimaksud adalah merupakan bahan baku dan semua peralatan lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.
- f. *Market*, merupakan pasar, dalam organisasi publik market akan terealisasi dalam bentuk opini masyarakat. Semeta dalam organisasi private atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat terakhir dalam pemasaran produk.

Selain 6M diatas, ada baiknya juga dipahami apa saja yang sebenarnya menjadi unsur-unsur administrasi menurut Syafri (2012;11) yang menyajikan unsur-unsur administrasi menjadi 8 bagian, yaitu:

- a. Organisasi

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah pengelompokan orang dan pembagian tugas dan sekaligus tempat berlangsung berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan. Sebagai wadah organisasi berwujud kotak struktur yang menggambarkan hierarki, kedudukan dari orang-orang pengelompokan orang dan pekerjaan, pola hubungan antar bagian atau unit

yang ada. Organisasi sebagai proses menggambarkan berlangsungnya bergai aktivitas dari kelompok orang dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Manajemen

Hakikat manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Oleh sebab itu manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen.

c. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan (informasi) dari seseorang kepada orang lain melalui saluran/media. Kelompok orang yang tergabung dalam suatu organisasi perlu melakukan komunikasi dengan pihak lain dalam usaha kerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Kepegawaian

kelompok orang yang tergabung dalam proses kerja sama suatu organisasi hanya akan menjadi kumpulan orang yang tidak bermanfaat jika tidak dilakukan pengaturan-pengaturan tentang siapa yang mengerjakan apa. Rangkaian aktivitas penyusunan dan pengatur pemanfaatan orang-orang yang diperlukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu merupakan aktivitas kepegawaian yang menjadi penting dalam administrasi.

e. Keuangan

Setiap tujuan yang ingin diraih memerlukan sejumlah uang. Tanpa ketersediaan dana, sejumlah atau seluruh kebijakan dan program tidak akan terlaksana yang berarti pula tidak tercapainya tujuan. Unsur keuangan dalam administrasi merupakan rangkaian aktivitas tag berkaitan dengan segi-segi pembiayaan dalam usaha kerja sama pencapaian tujuan tertentu

f. Pembekalan

Selain organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, dan keuangan, perbekalan merupakan sumber daya penting untuk mendukung pencapaian tujuan tertentu. Pembekalan merupakan sejumlah barang kebutuhan/peralatan yang diperlukan guna mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rangkaian aktivitas merencanakan, mengadakan, menatur pemakaiannya, penyimpanan, pengendalian, perawatan, dan penghapusan barang-barang keperluan kerja dalam usaha kerjasama pencapaian tujuan tertentu merupakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi.

g. Tata Usaha

Tata usaha merupakan kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, pemberian nomor/kode surat, pengetikan, penggandaan, penyimpanan, pengiriman, berbagai informasi yang diterima yang dikeluarkan oleh suatu organisasi/institusi dalam upaya kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

h. Hubungan Masyarakat

Hubungan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk hubungan menjaga eksistensi melalui pencapaian hubungan baik dan dukungan masyarakat sekeliling

terhadap usaha kerja sama yang sedang dilakukan tersebut. Tanpa dukungan dan hubungan baik masyarakat sekeliling tujuan.

Delapan unsur diatas sudah sangat jelas untuk menjadi landasan utama untuk sebuah administratif yang baik dalam menempatkan diri ditengah-tengah birokrasi pemerintah dengan secara menyeluruh, maupun manajemen pengawasan yang begitu kompleks akan siklus kelanjutan hidupnya sebagai sebuah organisasi publik yang baik. Hal diatas tentunya harus dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kuantan Singingi agar mampu melaksanakan kinerja dengan sebaik-baiknya. Dengan kinerja yang baik tentunya BPBD Kabupaten Kuantan Singingi bisa lebih mudah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas serta tempat berlangsung berbagai macam aktivitas bagi pencapaian tujuan sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Organisasi menurut Terry dalam Hamim (2005:24) adalah berasal dari kata “*organism*” yaitu struktur dengan bagian yang demikian di integrasi hingga hubungan Mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan hubungan mereka. Jadi organisasi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan. Dimana organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan sekedar pembagian kerja hanyalah salah satu azas organisasi. Sedangkan pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasian.

Menurut Manulang (dalam Hasibuan, 2012:24) Organisasi dalam arti dinamis adalah suatu penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, penetapan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan. Intinya pekerjaan lebih difokuskan pada dasar-dasar perkerjaannya, Bukan Orang-orang yang akan melaksanakannya, adapun orang-orang merupakan pihak yang ditugaskan atau ditujuk untuk menjalankan setiap pekerjaan yang telah dibagi-bagi tersebut, agar lebih spesifik atau lebih sederhana dan kecil.

Ada begitu banyak parah ahli yang memberikan pendapat mereka tentang organisasi. Salah satunya adalah Siagian (2014;139) yang menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian rangka suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Selain pengertian diatas menurut Siagian (2003;96) hakikatnya organisasi itu dilihat dari sudut pandang. Pertama, organisasi dipandang sebagai “wadah” dan organisasi dipandang sebagai “proses” dimana ketika organisasi dipandang sebagai wadah maka organisasi merupakan tempat dimana kegiatan-kegiatan administratif dan manajemen dijalankan. Kemudian ketika organisasi dipandang sebagai proses maka organisasi akan menyoroti interaksi antara orang-orang di dalam organisasi itu.

Sementara itu jika membicarakan organisasi sebagai proses, maka akan terlihat bahwa hal lebih mengutamakan sorotan pada hubungan yang terjadi diantara seluruh anggota organisasi. Itu sebabnya mengapa organisasi sebagai proses lebih dominan pada sifatnya yang dinamis dibandingkan dengan organisasi sebagai wadah.

Hubungan informal antara anggota organisasi tidak diatur dalam peraturan secara legal melalui bentuk terstruktur melainkan didasarkan pada beberapa sifatnya oleh Siagian (2003;96):

1. Hubungan yang didasarkan pada *personal relation*
2. Kesamaan keahlian para anggota organisasi
3. Kesamaan kepentingan dalam organisasi
4. Kesamaan minat dalam kegiatan-kegiatan diluar organisasi seperti olahraga, koperasi, dan lain-lain.

Dan berikutnya adalah jelas prinsip organisasi menurut Siagian (2003;97):

1. Terdapat tujuan yang jelas
2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi
3. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi
4. Adanya kestuan arah
5. Adanya kesatuan perintah
6. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang
7. Adanya pembagian tugas
8. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin
9. Pola dasar organisasi harus relative permanen

10. Adanya jaminan jabatan
11. Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan
12. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya.

Ke-12 prinsip tersebut memiliki posisi paling penting jika ingin siklus kehidupan organisasi berjalan dengan kualitas yang baik. Walau tidak diketahui apakah hasil akhir benar akan sangat ideal sesuai dengan target, namun setidaknya ketika lini organisasi mengikuti semua panduan dari awal secara teratur maka hasil yang diharapkan akan terwujud, walaupun meleset dari perkiraan dan tujuan biasanya tidak begitu jauh dari target yang sudah ditentukan.

Dari penjelasan diatas membuktikan bahwa organisasi BPBD Kuantan Singingi seharusnya mampu dalam menempatkan diri untuk dapat menghadapi tantangan lingkungan dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Jika BPBD Kabupaten Kuantan Singingi dapat menghadapi tantangan yang ada, maka organisasi ini bisa dinilai sebagai organisasi kuat, berkompeten dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata (*to manage*) yang berarti menangani, pengendalian, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu, manage adalah seseorang yang ditugaskan memimpin atau mengurus suatu tugas, lengkap, sah dan sebagainya. Manajemen juga sebagai ilmu dan seni kemudian manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang berhasil cukup lama. Tercapainya tujuan organisasi baik tujuan ekonomis sosial dan politik. Untuk sebagian besar

tergantung kepada komponen para manajer organisasi yang bersangkutan. Manajemen memberikan efektifitas pada usaha manusia.

Menurut Stoner et,al dalam Zuklifli dan Nurmasari (2015:28) mengatakan manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Jadi disimpulkan bahwa manajemen adalah kegiatan dengan melalui orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta dilaksanakan secara berurutan bejalan kearah satu tujuan. Dalam menegakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry (dalam Simanjuntak, 2005;9) adalah sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Organisasi)
3. *Staffing* (Kepegawaian)
4. *Motivating* (Motivasi)
5. *Controlling* (Pengawasan)

Sedangkan menurut Gie (dalam Samsudin, 2006;28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pembuatan keputusan
3. Pengarahan
4. Pengorganisasian
5. Pengawasan

6. Penyempurnaan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan membantu penilaian apakah fungsi-fungsi yang lain telah ditetapkan. Pengawasan membantu penilaian apakah fungsi-fungsi yang lain telah dilaksanakan secara efektif.

Selanjutnya manajemen sangat dibutuhkan dalam kehidupan organisasi dengan 3 (tiga) alasan pokok sebagaimana dikemukakan Siagian (2003;12) berikut:

- A. Untuk mencapai tujuan organisasi
- B. Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling ketergantungan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, serikat kerja, asosiasi perdagangan masyarakat dan pemerintahan.
- C. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.

Istilah manajemen yang berasal dari kata kerja “manage” yang berarti memimpin, membimbing dan mengatur. Secara tegas definisikan oleh GR Terry (dalam Simanjuntak, 2005;4) yang menyatakan bahwa “manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya lain.

Manajemen dapat dipandang sebagai fungsi, peranan maupun keterampilan. Reksohadiprodjo (dalam Simanjuntak, 2005:13) menguraikan lebih lanjut “manajemen sebagai fungsi meliputi usaha perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengorganisasian dan pengawasan. Manajemen sebagai peranan adalah antar pribadi pemberi informasi dan pengambil keputusan. Manajemen dapat pula berarti pengembangan keterampilan yaitu teknis, manusiawi dan konseptual.

Dapat dipahami, manajemen memiliki arti penting bagi setiap kegiatan yang dilakukan. Diperlukan kecakapan dan keterampilan dari mereka yang dapat merencana, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi serta mengawasi kegiatan-kegiatan organisasi sehingga tercapai tujuan organisasi yang diharapkan secara efektif dan efisien, karena manajemen mencakup berbagai kegiatan yang dapat dioperasionalkan didalam organisasi.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2012:2) “Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi”.

Selanjutnya Menurut Stoner yang dikutip oleh Siagian (2014:6) “Menejemen sumber daya manusia yaitu suatu prosedur berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang

yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya”.

Adapun menurut Hasibuan (2012:10), “MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan pula sebagai suatu pengolahan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai). Pengolahan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal didalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai.

Menurut Sedarmayanti (2014:7) tujuan manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut : salah satu alasan utama berdirinya organisasi adalah untuk mencapai tujuan.usaha untuk mecapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui pelaksaan berbagai macam tugas.berbagai macam tugas itu tentu saja berbeda-beda, dan tugas-tugas itu harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk membantu organisasi mencapai tujuannya.supaya bisa efektif dan efisien.

Tugas-tugas itu harus dilakukan oleh orang atau pelaksana yang tepat, yang memiliki kemampuan sesuai dengan tugas yang harus dilaksanakan, sehingga para pelaksana memiliki dorongan atau motivasi yang tinggi untuk menjalankannya. Selain dipengaruhi oleh adanya kesesuaian dengan kemampuan, juga harus sesuai dengan ganjaran yang diterima, dan tidak ada hambatan-hambatan yang serius dalam pelaksanaan pekerjaan dan lain-lain.

5. Konsep Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh seluruh manajemen, baik pada tingkat organisasi kecil maupun besar. Hasil kerja yang dicapai oleh organisasi atau karyawan adalah bentuk pertanggung jawab kepada organisasi dan publik. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhungan dengan kepuasan kerja karyawan dan tingkat besaran imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu.

Menurut Moeheriono (2012:95) Kinerja atau *performance*” merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.

Sedangkan Menurut Riva’i (2005:604) Kinerja Merupakan Suatu istilah secara umum yang digunakan sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan suatu referensi pada sejumlah standar seperti biaya masa lalu yang diproyeksi dengan dasar efisiensi, pertanggung jawaban atau Akuntabilitas Manajemen dan semacamnya.

Deskripsi dari Kinerja menyangkut tiga komponen penting,yaitu : Tujuan, ukuran dan Penilaian. Penentuan tujuan dari setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberi arah dan memengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personel.

b. Pengertian Pengukuran Kinerja

Kebersihan pencapaian strategi perlu diukur, karena pengukuran merupakan aspek kunci dari manajemen kinerja atas dasar bahwa apabila tidak diukur maka tidak akan meningkatnya (Simanjuntak, 2005:93). Oleh Karena itu sasaran strategi yang menjadi basis pengukuran kinerja perlu ditentukan ukurannya, dan ditentukan inisiatif strategi untuk mewujudkan sasaran tersebut. Sasaran Strategi beserta ukurannya kemudian digunakan untuk menentukan target yang akan dijadikan basis penilaian kinerja, untuk menentukan penghargaan yang akan diberikan kepada personel, tim atau unit organisasi.

Menurut Whittaker dalam Moeheriono (2012:72) Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goal sand objectives*).

c. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk menghasilkan data yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat memberikan informasi yang akurat bagi manajemen dalam pengambilan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik menurut Yuwono (dalam Riva'i, 2005:29) adalah :

1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggaran sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang yang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberikan kepuasan pelanggan.

2. Memotifasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengukuran terhadap pemborosan tersebut (*reduction of waste*).
4. Membuat tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
5. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi “reward” atas perilaku yang diharapkan tersebut.

6. Konsep Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

Kinerja seseorang merupakan gabungan dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat diukur dari akibat yang dihasilkan oleh karena itu akibat bukan menyangkut karakteristik pribadi yang ditunjukkan oleh seseorang melalui hasil kerja yang telah dan akan dilakukan seseorang, kinerja dapat pula diartikan sebagai kesuksesan individu dalam melakukan pekerjaannya, ukuran kesuksesan

masing-masing karyawan bergantung pada fungsi dari pekerjaannya yang spesifik dalam bentuk aktivitas selama kurun waktu tertentu, dengan kata lain, ukuran kesuksesan kinerja tersebut didasarkan pada ukuran yang dilakukan dan disesuaikan dengan pekerjaannya.

Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya". (Sudarmanto, 2009:7)

Menurut Baban Sobandi Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact. (Sudarmanto, 2009:176).

Hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi dalam menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Adanya hasil kerja yang dicapai oleh instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.

Teori yang digunakan yaitu teori kinerja dari Sobandi (dalam Sudarmanto, 2009:79) dan para ahli lainnya dalam buku yang berjudul Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Dalam Organisasi, berikut adalah indikator kinerja organisasi menurut Sobandi :

1. Keluaran (Output)

2. Hasil
3. Kaitan Usaha dengan Pencapaian
4. Informasi Penjelas

Pertama, keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kelompok keluaran (*output*) meliputi dua hal.

1. Kualitas pelayanan yang diberikan, indikator ini mengukur kuantitas fisik pelayanan.
2. Kuantitas pelayanan yang diberikan yang memenuhi persyaratan kualitas tertentu. Indikator ini mengukur kuantitas fisik pelayanan yang memenuhi uji kualitas.

Kedua, hasil adalah mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan. Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Maka segala sesuatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan pada jangka menengah harus dapat memberikan efek langsung dari kegiatan tersebut. Kelompok hasil, mengukur pencapaian atau hasil yang terjadi karena pemberian layanan, kelompok ini mencakup ukuran persepsi publik tentang hasil.

Ukuran keluaran disebut sangat bermanfaat jika disajikan secara komparatif dengan hasil tahun sebelumnya, target, tujuan, atau sasaran, norma, atau standar yang diterima secara umum. Efek sekunder dari pelayanan atas penerimaan atau pengguna bisa teridentifikasi dan layak dilaporkan. Ukuran itu mencakup akibat

tidak langsung yang signifikan, dimaksud atau tidak dimaksud, positif atau negatif, yang terjadi akibat pemberian pelayanan yang diberikan.

Ketiga, kaitan usaha dengan pencapaian adalah ukuran efisiensi yang mengkaitkan usaha dengan keluaran pelayanan. Berdasarkan pengertian diatas, maka Mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran di tingkat tertentu dari penggunaan sumber daya, menunjukkan efisiensi relatif suatu unit jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, tujuan yang ditetapkan secara internal, norma atau standar yang bisa diterima atau hasil yang bisa dihasilkan setara. Indikator yang mengaitkan usaha dengan pencapaian, meliputi dua hal.

1. Ukuran efisiensi yang mengaitkan usaha dengan keluaran pelayanan, indikator ini mengukur sumber daya yang digunakan atau biaya per unit keluaran, dan memberi informasi tentang keluaran ditingkat tertentu dari penggunaan sumber daya di lingkungan organisasi.
2. Ukuran biaya hasil yang menghubungkan usaha dan hasil pelayanan, ukuran ini melaporkan biaya per unit hasil, dan mengaitkan biaya dengan hasil sehingga manajemen publik dan masyarakat bisa mengukur nilai pelayanan yang telah diberikan.

Keempat, informasi penjabar adalah suatu informasi yang harus disertakan dalam pelaporan kinerja yang mencakup informasi kuantitatif dan naratif. Membantu pengguna untuk memahami ukuran kinerja yang dilaporkan, menilai kinerja suatu organisasi, dan mengevaluasi signifikansi faktor yang akan mempengaruhi kinerja yang dilaporkan. Ada dua jenis informasi penjabar yaitu:

1. Faktor substansial yang ada diluar kontrol seperti karakteristik lingkungan dan demografi.
2. Faktor yang dapat dikontrol seperti pengadaan staf.

Menurut Dwiyanto (dalam pasolong 2007:178), indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yaitu antara lain :

1. Produktivitas yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antar input dan output.
2. Kualitas pelayanan yaitu banyak pandangan negatif yang berbentuk mengenai organisasi publik yang muncul karena ketidak puasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terdapat layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.
3. Responsivitas yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. Akuntabilitas yaitu menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif atau kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (Abdullah, 2014:145). Sementara menurut Lohman dalam Abdullah (2014:145) indikator kinerja adalah suatu Variabel yang digunakan untuk

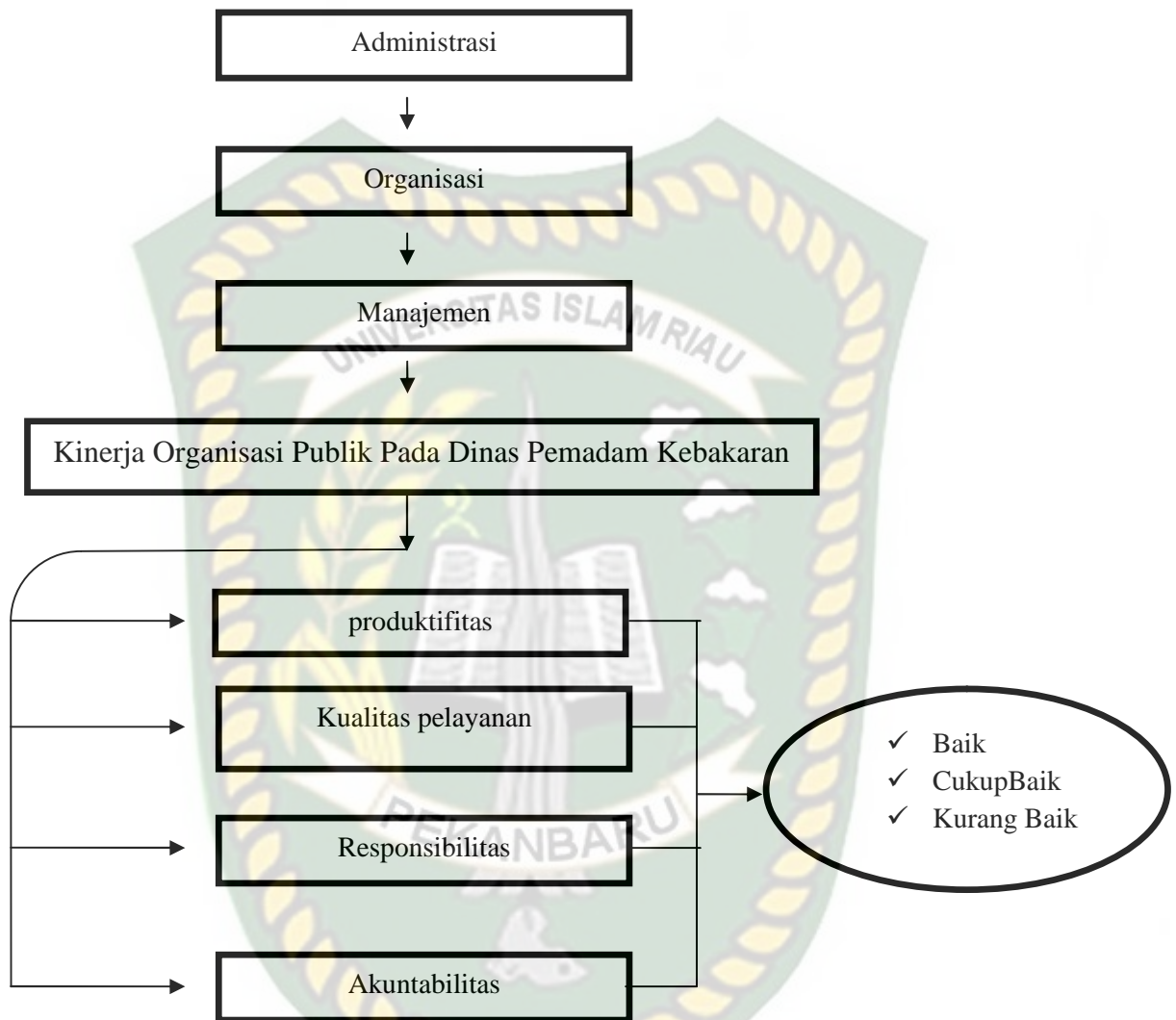
mengekspresikan secara kualitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan pedoman pada target-target dan tujuan organisasi. dalam pandangan lain, Moeheriono (2012:108) mendefinisikan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Indikator kinerja adalah nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome suatu kegiatan.
- b. Indikator kinerja adalah alat ukur yang dipergunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan oleh Moeheriono (2012:109) bahwa hampir semua pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 1. Kualitas, berkaitan dengan jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai
 2. Kualitas, berkaitan dengan mutu yang dihasilkan baik berupa kerapian kerja dan ketelitian kerja atau tingkat kesalahan yang dilakukan pegawai.
 3. Ketepatan waktu, yaitu sesuai apa tidak waktu yang direncanakan.

B. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir penelitian mengenai Kinerja Organisasi publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan adalah berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar II.I: Kerangka Pikir Penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan.



Sumber : Modifikasi Penulis 2018

C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah atau pun konsep terkait usulan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

1. Administrasi adalah segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, komputerisasi, surat menyurat (korespondensi), kearsipan, agenda. Dalam penelitian ini, administrasi adalah segala hal termasuk menulis, mendokumentasikan hasil penelitian, dan lain-lain.
2. Organisasi adalah suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai tugas dan fungsi yang dilakukan oleh pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan.
3. Manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni dalam mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi, pegawai dan masyarakat.
5. Kinerja merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.
6. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
7. Dinas Pemadam Kebakaran merupakan instansi pemerintahan yang memiliki kriteria yang menentukan baik tidaknya kinerja mereka dalam melaksanakan

kewajibannya yaitu melindungi keselamatan baik jiwa, harta dan benda masyarakat pada umumnya ketika terjadinya kebakaran.

8. Produktivitas yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antar input dan output.
9. Kualitas pelayanan yaitu banyak pandangan negatif yang berbentuk mengenai organisasi publik yang muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Kepuasan masyarakat terdapat pada layanan yang dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik.
10. Responsibilitas yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
11. Akuntabilitas yaitu menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini yaitu tentang Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan. Adapun penjabaran variabel-variabel pelayanan publik tersebut kedalam operasional variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1: Operasionalisasi Variabel Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian	Kategori
Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Surjadi (2009:7).	Kinerja organisasi publik	Produktivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kemampuan dinas pemadam kebakaran dalam memadamkan api. 2. Menyelamatkan harta dan jiwa korban kebakaran. 3. Tingkat produktifitas yang dihasilkan oleh dinas pemadam kebakaran. 	Baik Cukup baik Kurang baik
		Kualitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran. 2. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran. 3. Tidak ada masyarakat yang melakukan complain terhadap pelayanan dinas pemadam kebakaran. 	Baik Cukup baik Kurang baik
		Responsibilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan hasil laporan setiap terjadi kebakaran dalam pembukuan. 2. Memberikan pelayanan secara professional dan cepat tanggap. 3. Adanya sistem proteksi kebakaran yang handal. 	Baik Cukup baik Kurang baik
		Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan prosedur dalam memberikan pelayanan. 2. Pelayanan yang diberikan sudah efektif dan efisien. 3. Memenuhi standar kualifikasi dan jumlah petugas operasional pemadam kebakaran yang memadai. 	Baik Cukup baik Kurang baik

Sumber: Modifikasi Penulis, 2019.

E. Teknik Pengukuran

Pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu Baik (3 skor), Cukup Baik (2 skor), dan Kurang Baik (1 skor). Adapun uraian dari masing-masing pengukuran tersebut adalah:

Baik : Apabila Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan berada pada kategori 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan berada pada kategori 34% - 66%

Kurang Baik : Apabila Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan berada pada kategori 0% - 33%.

Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan, kriteria pengukuran indikatornya adalah:

1. Produktivitas

Baik : Apabila tanggapan responden terhadap indikator Produktivitas berada pada kategori 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila tanggapan responden terhadap indikator Produktivitas berada pada kategori 34% - 66%

Kurang Baik : Apabila tanggapan responden terhadap indikator Produktivitas berada pada kategori 0% - 33%

2. Kualitas Pelayanan

Baik : Apabila tanggapan responden terhadap indikator Kualitas Pelayanan berada pada kategori 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila tanggapan responden terhadap indikator Kualitas Pelayanan berada pada kategori 34% - 66%

Kurang Baik : Apabila tanggapan responden terhadap indikator Kualitas Pelayanan berada pada kategori 0% - 33%

3. Responsibilitas

Baik : Apabila tanggapan responden terhadap indikator Responsibilitas berada pada kategori 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila tanggapan responden terhadap indikator Responsibilitas berada pada kategori 34% - 66%

Kurang Baik : Apabila tanggapan responden terhadap indikator Responsibilitas berada pada kategori 0% - 33%

4. Akuntabilitas

Baik : Apabila tanggapan responden terhadap indikator Akuntabilitas berada pada kategori 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila tanggapan responden terhadap indikator Akuntabilitas berada pada kategori 34% - 66%

Kurang Baik : Apabila tanggapan responden terhadap indikator Akuntabilitas berada pada kategori 0% - 33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbentuk deskriptif, dengan analisa kuantitatif, yaitu suatu yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian, sehingga akan ditemukan kejadian-kejadian relative dan diperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Tipe penelitian kuantitatif digunakan karena dapat lebih akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian analisis deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode ini juga disebut sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap yang ditemukan di lapangan.

Selanjutnya sebagai alat untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Analisis Pelaksanaan kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi pada dinas pemadam kebakaran kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan. Dengan alasan utama pemilihan lokasi penelitian adalah karena dinas pemadam kebakaran merupakan instansi yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya. Dimana dinas pemadam kebakaran terlatih untuk menyelamatkan korban-korban bencana.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono (2014;90) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Sugiyono (2014;19) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative atau mewakili.

Untuk jelasnya jenis populasi dan besarnya sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.I: Populasi dan Sampel Penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi Di Kota Taluk Kuantan

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1	1	100%
2	Komandan Pleton	1	1	100%
3	Komandan Regu	3	3	100%
4	Mekanik	3	3	100%
5	Operator Mobil Pemadam Kebakaran (MPK)	2	2	100%
6	Juru Pemadam	8	5	63%
Jumlah		18	15	83%

Sumber : Data Dinas Pemadam Kebakaran Kuantan Singingi 2019.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dinas pemadam kebakaran kabupaten kuantan singingi. Menurut Arikunto (2006;130) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan elemen-elemen yang menjadi objek penelitian.

Dalam mengumpulkan data, peneliti mewawancarai Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dan untuk responden lainnya, peneliti menggunakan teknik kuisisioner dalam mengumpulkan data.

D. Teknik Penarikan Sampel

Penulis menetapkan untuk menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) pada Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Komandan Pleton, Komandan Regu, Mekanik, dan Operator Mobil Pemadam Kebakaran (MPK). Karena seluruh populasi dijadikan sampel.

Kemudian untuk Juru Pemadam Kebakaran, peneliti menggunakan Teknik Insidental Sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yakni

siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2010:96).

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang langsung diterima oleh responden yang diperlukan antara lain :
 - a. Identitas responden
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan kinerja organisasi publik Dinas pemadam kebakaran kabupaten kuantan singingi kota taluk kuantan.
 - c. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kinerja organisasi publik Dinas pemadam kebakaran kabupaten kuantan singingi kota taluk kuantan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen, data statistik dan sebagainya antara lain:
 - a. Keadaan sosial ekonomi masyarakat
 - b. Tugas dan fungsi dinas pemadam kebakaran kota taluk kuantan.
 - c. Keadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran kota taluk kuantan.
 - d. Struktur organisasi dan prasarana pemadam kebakaran.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara, yaitu melakukan dialog/percakapan (tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung dari kepala dinas pemadam kebakaran

kota taluk kuantan untuk menanyakan pelaksanaan pelayanan pegawai/personil terhadap pelayanan pemadam kebakaran pada masyarakat.

2. Kuesioner, yaitu untuk melengkapi data yang diperlukan maka dibutuhkan menyusun daftar pertanyaan beserta jawabannya yang diberikan kepada masyarakat.
3. Observasi, yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti, guna untuk lebih mengetahui sejauh mana pelaksanaan kinerja dinas pemadam kebakaran kota taluk kuantan, sehingga data yang diperlukan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.
4. Dokumentasi, yaitu untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Arikunto (2006;235) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penelitian setelah data terkumpul. Analisis data kualitatif adalah menggunakan data statistik. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data tersebut dikelompokan menurut masing-masing variabel beserta indikator. Kemudian data dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan alat bantu tabel frekuensi dengan teknik skoring, untuk menganalisis kinerja organisasi publik (pemadam kebakaran).

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

1. Keadaan Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan terbentuknya sebuah Kabupaten baru sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu, yakni Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing yang memiliki ibu kota Teluk Kuantan. Melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian, yakni Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu kotanya Taluk Kuantan

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah kabupaten Defenitif yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/Kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti dan Kecamatan Benai. Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012, jumlah Kecamatan Kuantan singingi tercatat menjadi 15 Daerah Kecamatan. Kecamatan-Kecamatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Benai
2. Kecamatan Cerenti
3. Kecamatan Gunung Toar
4. Kecamatan Hulu Kuantan
5. Kecamatan Inuman

6. Kecamatan Kuantan Hilir
7. Kecamatan Kuantan Mudik
8. Kecamatan Kuantan Tengah
9. Kecamatan Logas Tanah Darat
10. Kecamatan Pangean
11. Kecamatan Singingi
12. Kecamatan Singingi Hilir
13. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang
14. Kecamatan Sentajo Raya
15. Kecamatan Pucuk Rantau

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah Lintas Sumatera dan berada dibagian selatan Provinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 Km², yang berada pada posisi antara 0⁰⁰-1⁰⁰ Lintang Selatan dan 101⁰ 02 – 101⁰ 55 Bujur Timur. Batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

1. Sebelah utara : Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah selatan : Propinsi Jambi
3. Sebelah barat : Propinsi Sumatra Barat
4. Sebelah timur : Kabupaten Indragiri Hulu

2. Topografi

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara Morfologi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan,

dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 3⁰-15⁰ diatas permukaan laut.

3. Geologi

Secara struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar, dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis, batuan vulkanik, dan instrusi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam.

4. Iklim

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6⁰C – 36,5⁰ C dan suhu minimum berkisar antara 19,2⁰C – 22,0⁰ C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm per tahun.

5. Hidrografi

Terdapat dua sungai besar yang melintas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan dan Sungai Singingi, maka untuk nama Kuantan Singingi diambil dari 2 induk sungai yang mengalir mengelilingi Kabupaten Kuansing yaitu sungai kuantan dan sungai singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan, dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah aliran sungai (DAS) sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) Kecamatan.

6. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang bersih, efektif, religius, cepat, aman, harmonis, agamis, berbudaya dan bersejarah (KUANSING BERCAHAYA).

b. Misi

- a. Peningkatan upaya pemerintahan yang bersih sebagai langkah mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik di Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Mengefektifkan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah yang berkualitas dan berimbang serta mendorong berbagai lapangan usaha/usaha baru yang memanfaatkan sumber daya manusia local/daerah.
- d. Membangun hubungan yang harmonis sekaligus meningkatkan respon dan kepekaan aparat pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap lapisan masyarakat.
- e. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dalam menjalankan usahanya di Kabupaten Kuantan Singingi
- f. Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat antar penduduk maupun antar wilayah.

- g. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang memadai.
- h. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam melalui optimalisasi agrobisnis dan agroindustri dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar secara berkesinambungan.
- i. Peningkatan implementasi desentralisasi dan otonomi di daerah melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Meningkatkan stabilitas kerukunan beragama dan melestarikan adat serta budaya daerah dan budaya nasional dilingkungan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Gambaran Umum Dinas Pemadam Kebakaran

1. Sejarah Pemadam Kebakaran Kuantan Singingi

Pemadam kebakaran secara *ex officio* dibawah naungan *trantibum* yang pada tahun 1999 bernama badan di pimpin oleh Bapak Zulbahri Komala sebagai Kasi *Trantibum*. Tahun 2002 menjadi Bagian Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Enderlis, SH. Pada tahun 2006 dipimpin oleh Drs. Suyanto. Pada tahun 2007 di pimpin oleh Hernalis, S.Sos. Pada tahun 2009 menjadi Kantor Polisi Pamong Praja dipimpin Hernalis, S.Sos. (Seksi *Trantib* dan *Damkar*, Kasi : Sanusi, S.Sos).

Pada tahun 2010 dipimpin oleh Drs. H. Syoffaizal. Pada tahun 2011 dipimpin oleh Erdiansyah, S.Sos. (Seksi *Trantib*, Kasi : Reno Sunkar, SE). Pada tahun 2013 menjadi Satuan polisi pamong praja dipimpin oleh Erdiansyah, S.Sos. (Seksi *Trantib* dan *Damkar*, Kasi : Reno Sunkar, SE). Pada tahun 2016 menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dipimpin

oleh Erdiansyah, S.Sos. (Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kabid : Ir. Efrizal, Drs. Simbolon, dan Drs. Martono).

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut:

VISI :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana”.

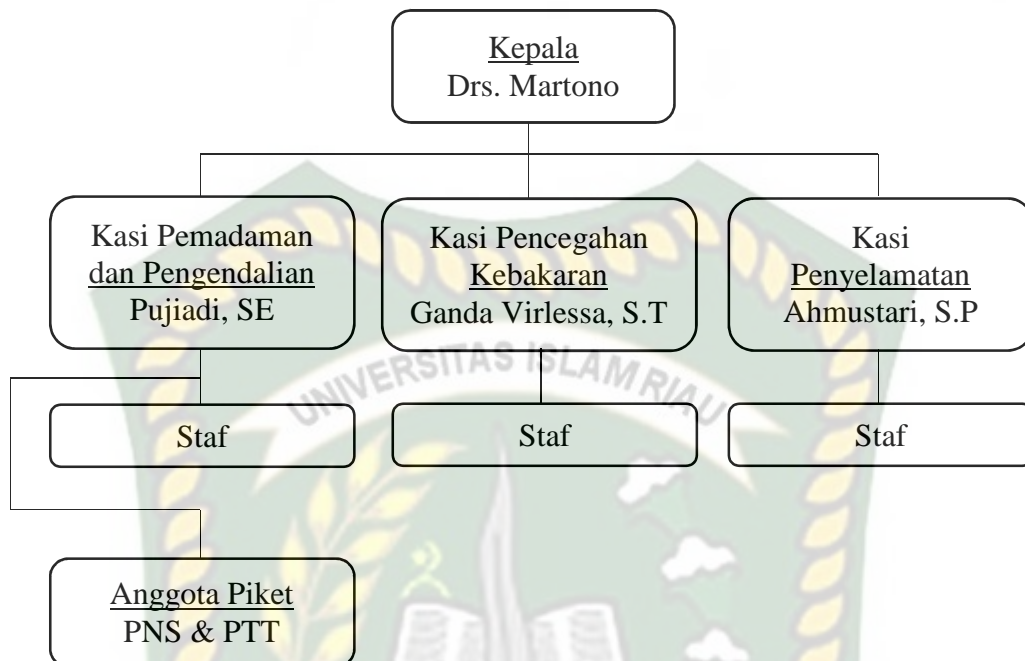
MISI :

- a. Mewujudkan Penyelenggaraan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
- b. Mewujudkan Penanganan Darurat Bencana Yang Efektif, Efisien Dan Profesional;
- c. Mewujudkan Pelayanan Pemadam Kebakaran Yang Cepat, Tepat Dan Profesional;
- d. Mewujudkan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Berkualitas;
- e. Mewujudkan Pelayanan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pembangunan Terhadap Dampak Bencana Yang Terpadu Dan Berkelanjutan;
- f. Mewujudkan Manajemen Aparatur Yang Profesional.

3. Struktur Organisasi Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar IV.1: Struktur Organisasi Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Data Penelitian, 2019.

4. Tugas dan Fungsi Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi

a. Kepala Pemadam Kebakaran

Kepala Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Kepala Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Bidang Pemadam Kebakaran;
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pemadaman dan Pengendalian

Seksi Pemadaman dan Pengendalian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan, membuat konsep pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam hal melaksanakan operasional Pengendalian Kebakaran, serta mengoreksi dan mengevaluasi penyelenggara Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran.

Uraian tugas Seksi Pengendalian Kebakaran meliputi sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, inventarisir kebutuhan dan penyiapan perencanaan program serta rencana kerja anggaran (RKA) kegiatan pada Seksi Pencegahan Kebakaran dan melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana mobil pemadam kebakaran, dan peralatan pemadaman dan bantuan penyelamatan lain;
2. Menyiapkan perencanaan Standa Operasional Prosedur (SOP), Prosedur Tetap (Protap) dan aturan lain sesuai Perundang-undangan;
3. Menyiapkan pembuatan burrier penghalang api terutama antara lahan pemukiman dan hutan;
4. Melaksanakan dan mengkoordinasi pelaksanaan operasional, pengontrolan pendistribusian tugas, pembimbingan dan pengarahan kepada bawahan;
5. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan kesiapan/kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan;
6. Melaksanakan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan dokumentasi dan pengendalian dan penanggulangan pemadaman kebakaran;

7. Melaksanakan operasional pengawasan, pengecekan, pemantauan/ monitoring dan patroli dalam rangka pengendalian bantuan pemadaman kebakaran;
8. Melaksanakan kegiatan rekrutmen, pendidikan, pelatihan, kursus, pembinaan, penyuluhan, sosialisasi, simulasi bagi tenaga sukarela pertolongan bencana;
9. Menyiapkan dan membuat himbauan penghindaran pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang lebih luas;
10. Menyiapkan dan menetapkan komunikasi pada kejadian kebakaran;
11. Menyiapkan serta menetapkan operasi dan latihan gabungan pengendalian kebakaran dengan instansi terkait;
12. Membuat konsep rekomendasi perizinan pemanfaatan gedung dengan instansi pemerintah swasta dalam pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
13. Melaksanakan rapat evaluasi dan penyusunan penyampaian laporan kegiatan;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Seksi Pencegahan Kebakaran

Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pencegahan Kebakaran. Kemudian menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan pada Seksi Pencegahan Kebakaran;
8. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran;
9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi pada Seksi Pencegahan Kebakaran;
10. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Seksi Pencegahan Kebakaran;
11. Pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Seksi Penyelamatan

Seksi Penyelamatan mempunyai tugas :

1. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Penyelamatan;
2. Membagi tugas kepada bawahan;
3. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan;
5. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
7. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Penyelamatan;
8. Menyiapkan kegiatan fasilitasi penyelamatan pada kecelakaan transportasi, bangunan, air, ketinggian, bahan-bahan berbahaya bencana dan bantuan layanan medis darurat ambulans;
9. Menyiapkan kegiatan pemberian bantuan operasi penyelamatan;
10. Menyiapkan kegiatan pembinaan kesiapsiagaan dan kesigapan petugas penyelamatan;
11. Menyiapkan kegiatan simulasi penyelamatan pada Instansi Pemerintah, swasta dan masyarakat;
12. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Penyelamatan;
13. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Penyelamatan;
14. Menyiapkan Penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
15. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelamatan;
16. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelamatan; dan
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Program Kerja Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi

- Melanjutkan program kerja tahun 2017/2018 pemadam kebakaran kabupaten Kuantan Singingi yang pada tahun sebelumnya melaksanakan pengiriman anggota ke Pusat Pelatihan Diklat Pemadaman di Ciracas Jakarta Selatan guna meningkatkan ilmu pengetahuan anggota dalam mengenal dan melaksanakan teknis kerja di lapangan demi memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2019 dan 2020 selalu mengutus anggota untuk mengikuti PUSDIKLAT di Ciracas Jakarta Selatan.

- Pada tahun 2020 yang akan datang akan menambah pos rayon di beberapa titik area kecamatan yang sangat sulit di antisipasi ketika terjadi bencana kebakaran di kecamatan tersebut mengingat respon time (15 menit) dari pos induk ke kecamatan. Rencana akan didirikan pos baru, dengan menempatkan armada dan anggota piket di pos yang baru akan memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat.
- Melakukan agenda bulanan dalam melaksanakan simulasi kebakaran.
- Memberikan penyuluhan Pendidikan akan bahaya kebakaran ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Agenda Kegiatan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi

Sistem kerja pemadam kebakaran dibagi menjadi 2 (dua) shift pagi dari jam 07.00 WIB s/d 19.00 WIB. Dan untuk shift malam dari jam 19.00 WIB s/d 07.00 WIB. Regu piket dibagi menjadi 3 (tiga) pleton. Masing-masing pleton di komadoi oleh :

- 1) Komandan Pleton (DANTON)
- 2) Komandan Regu (DANRU)
- 3) Mekanik
- 4) Operator / Driver
- 5) Juru Padam (Nozel Man & Penggelar Selang)

Masing-masing pleton standby pada jam kerja atau jadwal yang telah di susun. Regu piket dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Regu I Pleton YUDHA
- 2) Regu II Pleton BRAMA
- 3) Regu III Pleton JAYA

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, yaitu 1 orang Kabid Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 1 orang Komandan Pleton, 3 orang Komandan Regu, 3 orang Mekanik, 2 orang Operator Mobil Pemadam Kebakaran (MPK), dan 5 orang Juru Pemadam. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia responden.

1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin dalam penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan terdiri dari satu jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1: Distribusi Identitas Responden Penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	15	100%
2	Perempuan	-	0%
Jumlah		15	100%

Sumber : Data Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden dalam penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan terdiri dari 15 orang jenis kelamin laki-laki (100%) dan tidak ada yang berjenis kelamin perempuan. Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin responden di dominasi oleh laki-laki yaitu dengan persentase 100%.

2. Tingkat Pendidikan

Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan terdiri dari dua tingkat pendidikan yaitu SLTA dan Sarjana. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	SLTA	9	60%
2	Sarjana	6	40%
	Jumlah	15	100%

Sumber: Data Penelitian, 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan terdiri dari tingkat pendidikan SLTA sebanyak 9 orang (60%), dan tingkat Sarjana yang berjumlah 6 orang (40%). Dari uraian

diatas terlihat tingkat pendidikan responden di dominasi oleh pendidikan SLTA yaitu dengan persentase 60%.

3. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden dalam penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.3: Distribusi Identitas Responden Penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1	20 – 30	3	20%
2	31 – 40	6	40%
3	41 – 50	6	40%
Jumlah		15	100%

Sumber : Data Penelitian, 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan yang berada pada usia 20-30 berjumlah 3 orang (20%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 6 orang (40%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 6 orang (40%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya

lebih dominan berada pada usia 31-40 tahun dan usia 41-50 tahun, yaitu dengan jumlah persentase 40%.

B. Hasil Penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi Di Kota Taluk Kuantan

Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan pada penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari empat indikator yang meliputi Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Untuk mengetahui dan menganalisis penilaian tentang Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan, maka dapat dilihat dari indikator variabel berikut ini :

1. Produktivitas

Produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antar input dan output. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Tingkat kemampuan dinas pemadam kebakaran dalam memadamkan api, Menyelamatkan harta dan jiwa korban kebakaran, dan Tingkat produktifitas yang dihasilkan oleh dinas pemadam kebakaran.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 15 orang

responden mengenai indikator Produktivitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan, dapat dilihat pada tabel V.4 berikut ini :

Tabel V.4: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Mengenai Indikator Produktivitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Tingkat kemampuan dinas pemadam kebakaran dalam memadamkan api	9	6	-	15
2	Menyelamatkan harta dan jiwa korban kebakaran	6	9	-	15
3	Tingkat produktifitas yang dihasilkan oleh dinas pemadam kebakaran	7	8	-	15

Sumber : Data Olahan, 2019.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden pegawai yang berjumlah 15 orang mengenai indikator produktivitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan, dapat dilihat pada tabel V.5 berikut ini :

Tabel V.5 : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Mengenai Indikator Produktivitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
		(3 skor)	(2 skor)	(1 skor)	
1	Tingkat kemampuan dinas pemadam kebakaran dalam memadamkan api	27	12	-	39
2	Menyelamatkan harta dan jiwa korban kebakaran	18	18	-	36
3	Tingkat produktifitas yang dihasilkan oleh dinas pemadam kebakaran	21	16	-	37
Total Skor					112

Sumber : Data Olahan, 2019.

Skor Tertinggi : $15 \times 3 = 45$

Skor Tertinggi Indikator : $45 \times 3 = 135$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor tertinggi}} \times 100$$

$$\% = \frac{112}{135} \times 100$$

$$= \frac{11.200}{135}$$

$$= 83\%$$

Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan dalam indikator produktivitas berada dalam kategori **Baik** dengan persentase 83%. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden pegawai Dinas Pemadam Kebakaran. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Baik.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Martono selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator produktivitas, beliau menjelaskan bahwa :

“Dalam proses pemadaman kebakaran kadang-kadang saya terjun kadang tidak, karena melihat kondisi dan situasi, kalau kebakaran besar istilahnya perlu koordinasi lebih lanjut, jangankan kabid, pimpinan juga harus turun, kasi, sekretaris, seperti kebakaran hutan contohnya. Kalau bisa regu memadamkan dan menetapkan yang nanti akan melaporkan kepada pimpinan, kadang-kadang semua turun personilnya. Pos pemadam kebakaran di kuansing hanya ada satu saja. Dan menurut saya belum efektif, karena kuansing ini luas ada 15 kecamatan. Itu kalau hanya satu

tentu belum efektif, cuman setiap kecamatan sebenarnya harus ada. Dari segi produktivitas, hampir rata-rata bisa diminimalisir walaupun kadang-kadang masih ada yang kecewa. Kadang semua itu terjadi karena jarak, karena pos Cuma satu dan kita ada 15 kecamatan. Yang Namanya api sudah besar susah untuk dipadamkan. Kadang harus memakai 5 armada baru padam. Kadang-kadang masyarakat panik, api sudah besar baru menghubungi Damkar”. (Wawancara : Jum’at, 26 Juli 2019, pukul 09.00 WIB).

Kemudian adapun hasil wawancara dengan Bapak Yuli Ardiansyah selaku Komandan Regu Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator produktivitas, beliau menjelaskan bahwa :

“Peranan pemadam kebakaran sangatlah penting ditengah kehidupan masyarakat dalam mengatasi musibah kebakaran bagaimana tidak suatu musibah kebakaran sangatlah sulit di evakuasi ditengah padatnya pemukiman warga, hal semacam ini akan terasa amat sulit diatasi dengan system kerja manual oleh warga/masyarakat tanpa bantuan dari pemadam kebakaran. Untuk menciptakan kinerja yang baik dari anggota diperlukan komunikasi, berkomunikasi dengan anggota dengan dua acara, pertama, mengadakan apel pagi setiap jam kerja, dalam apel tersebut dengan menyampaikan kendala dan solusi petugas di lapangan. Kedua, mengadakan sharing menyeluruh dengan petugas. Satu kali dalm satu minggu dengan topik pertemuan evaluasi kinerja dan terobosan peningkatan kapasitas kerja petugas pemadam kebakaran. Kemudian hasil kinerja dinas pemadam kebakaran dari segi produktivitas juga sudah baik”. (Wawancara : Jum’at, 26 Juli 2019, pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator produktivitas, peneliti melihat bahwa produktivitas yang dihasilkan oleh pegawai dinas pemadam kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi seperti tingkat kemampuan petugas pemadam kebakaran dalam memadamkan api sudah sangat baik, karena petugas pemadam kebakaran pada umumnya telah memiliki sertifikat pemadam yang diperoleh dari diklat. Kemudian selama ini juga belum pernah ada korban jiwa yang terjadi pada kejadian kebakaran yang ada di

Kabupaten Kuantan Singingi, semua jiwa yang terancam dalam kejadian kebakaran bisa diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden pegawai pemadam kebakaran melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kabid Pemadam Kebakaran dan Komandan Regu, serta hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator produktivitas dalam penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan berada pada kategori penilaian Baik.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan tingkat pelayanan yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan dan kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan banyak pandangan negatif yang berbentuk mengenai organisasi publik yang muncul karena ketidak puasan publik terhadap kualitas. Kepuasan masyarakat terdapat pada layanan yang dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran, dan Tidak ada masyarakat yang melakukan complain terhadap pelayanan dinas pemadam kebakaran.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 15 orang responden mengenai indikator Kualitas Pelayanan terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan, dapat dilihat pada tabel V.6 berikut ini :

Tabel V.6: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Mengenai Indikator Kualitas Pelayanan terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran	10	5	-	15
2	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran	-	6	9	15
3	Tidak ada masyarakat yang melakukan complain terhadap pelayanan dinas pemadam kebakaran	4	7	4	15

Sumber : Data Olahan, 2019.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden pegawai yang berjumlah 15 orang mengenai indikator Kualitas pelayanan terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan, dapat dilihat pada tabel V.7 berikut ini :

Tabel V.7 : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Mengenai Indikator Kualitas Pelayanan terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
		(3 skor)	(2 skor)	(1 skor)	
1	Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran	30	10	-	40
2	Tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran	-	12	9	21

1	2	3	4	5	6
3	Tidak ada masyarakat yang melakukan complain terhadap pelayanan dinas pemadam kebakaran	12	14	4	30
Total Skor					91

Sumber : Data Olahan, 2019.

Skor Tertinggi : $15 \times 3 = 45$

Skor Tertinggi Indikator : $45 \times 3 = 135$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor tertinggi}} \times 100$$

$$\% = \frac{91}{135} \times 100$$

$$= \frac{9.100}{135}$$

$$= \mathbf{67\%}$$

Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan dalam indikator Kualitas pelayanan berada dalam kategori **Baik** dengan persentase 67%. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden pegawai Dinas Pemadam Kebakaran. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Baik.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Martono selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator Kualitas pelayanan, beliau menjelaskan bahwa :

“Peraturan tentang standar pelayanan minimum untuk kasus kebakaran hutan, Gedung bertingkat, dan perumahan masyarakat itu semua sudah ada SOP nya. Kemudian mengenai jumlah anggota pemadam kebakaran

kalau untuk satu pos sudah cukup, tapi kalau dibuat pos di kecamatan masih kurang, tapi sekarang Cuma ada satu pos. sekarang anggota damkar nya ada, sebanyak 30 orang untuk satu kabupaten, tapi kita masih belum berdiri sendiri, kita masih dibawah naungan Satpol PP, mungkin kedepan jika sarana dan prasarana sudah memadai, rencanya pemerintah akan membentuk BPBD termasuk nanti didalamnya Damkar akan bergabung. Sekarang masih dalam proses pembahasan, tapi tidak dinas damkar, nanti damkar masih bergabung juga dengan BPBD. Seharusnya damkar harus pisah sendiri minimal kantornya satu. Karena tugasnya spesifik, kebakaran hutan tidak hanya Gedung, jika terjadi dua kebakaran sehari, maka personil akan dibagi misalkan terjadi kebakaran hutan dan Gedung, karena punya alat armada ada tujuh. Dari segi kualitas pelayanan kinerja petugas damkar sudah baik”. (Wawancara : Jum’at, 26 Juli 2019 pukul 09.00 WIB).

Kemudian adapun hasil wawancara dengan Bapak Yuli Ardiansyah selaku Komandan Regu Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator Kualitas pelayanan, beliau menjelaskan bahwa :

“Cara mengkoordinasikan tim pemadam kebakaran yaitu dengan membuat system kerja shift dibagi menjadi tiga shift pagi, siang dan malam masing-masing 12 jam kerja. Disaat setiap kejadian kebakaran petugas harus bekerja sesuai SOP dengan ketentuan melapor berjenjang ke pimpinan, setelah pimpinan berwenang memberi izin petugas baru bisa melaksanakan tugasnya. Dilapangan tugas pimpinan tertinggi instansi diambil alih oleh komandan pleton atau komandan regu yang telah disusun. Kemudian usaha petugas dalam usaha penanggulangan kebakaran selalu maksimal dengan catatan-catatan penting, dalam setiap kejadian kebakaran contoh rumah /Gedung, petugas senantiasa memberikan pelayanan terbaik dengan datang ke lokasi kejadian dengan secepatnya dan berusaha maksimal tidak melebihi batas waktu respon kebakaran rumah ukuran normal 15 menit. Lain halnya kebakaran lahan perkebunan petugas tidak berpatokan pada waktu respon. Dari segi kualitas pelayanan, kinerja dinas pemadam kebakaran saya pikir sudah cukup baik”. (Wawancara : Jum’at, 26 Juli 2019 pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator Kualitas pelayanan, peneliti melihat bahwa dinas pemadam

kebakaran kabupaten Kuantan singingi sudah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat atau publik, yaitu dengan mengadakan simulasi di sekolah-sekolah, kantor pemerintahan dan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Kuansing yang di agendakan satu bulan sekali. Karena dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dapat mencegah secara dini akan timbulnya kebakaran. Disamping itu, dinas pemadam kebakaran juga sering mendapat kritik dan komplain dari masyarakat yang kecewa dengan kinerja dinas pemadam kebakaran Kuansing. Hal ini disebabkan oleh karena jarak tempuh yang jauh, sehingga pemadam kebakaran selalu terlambat datang ke lokasi kebakaran.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden pegawai pemadam kebakaran melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kabid Pemadam Kebakaran dan Komandan Regu, serta hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Kualitas pelayanan dalam penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan berada pada kategori penilaian Baik.

3. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan kemampuan birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Memberikan hasil laporan setiap terjadi kebakaran dalam pembukuan, Memberikan pelayanan secara professional dan cepat tanggap, dan Adanya sistem proteksi kebakaran yang handal.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 15 orang responden mengenai indikator Responsibilitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan, dapat dilihat pada tabel V.8 berikut ini :

Tabel V.8: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Mengenai Indikator Responsibilitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Memberikan hasil laporan setiap terjadi kebakaran dalam pembukuan	12	3	-	15
2	Memberikan pelayanan secara professional dan cepat tanggap	7	5	3	15
3	Adanya sistem proteksi kebakaran yang handal	1	4	10	15

Sumber : Data Olahan, 2019.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden pegawai yang berjumlah 15 orang mengenai indikator Responsibilitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan, dapat dilihat pada tabel V.9 berikut ini :

Tabel V.9 : Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Mengenai Indikator Responsibilitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
		(3 skor)	(2 skor)	(1 skor)	
1	2	3	4	5	6
1	Memberikan hasil laporan setiap terjadi kebakaran dalam pembukuan	36	6	-	42

1	2	3	4	5	6
2	Memberikan pelayanan secara professional dan cepat tanggap	21	10	3	34
3	Adanya sistem proteksi kebakaran yang handal	3	8	10	21
Total Skor					97

Sumber : Data Olahan, 2019.

Skor Tertinggi : $15 \times 3 = 45$

Skor Tertinggi Indikator : $45 \times 3 = 135$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor tertinggi}} \times 100$$

$$\% = \frac{97}{135} \times 100$$

$$= \frac{9.700}{135}$$

$$= 72\%$$

Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan dalam indikator Responsibilitas berada dalam kategori **Baik** dengan persentase 72%. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden pegawai Dinas Pemadam Kebakaran. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Baik.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Martono selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator Responsibilitas, beliau menjelaskan bahwa :

“Dinas pemadam kebakaran punya program sosialisasi kepada masyarakat untuk menanggulangi bahaya kebakaran, kadang-kadang kita

diminta oleh desa, kami di minta untuk turun untuk simulasi atau sosialisasi. Disana kita mengajarkan bagaimana cara menghindari kebakaran. Dari segi responsibilitas, Pegawai disini sudah cepat tanggap dan mengerti dengan tugasnya. Kalau terjadi kebakaran, walaupun kami tidak ditelpon, kami tetap langsung gerak menuju ke lokasi kebakaran. Faktor penghambat kami yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberi jalan, apalagi mobil, masyarakat sering acuh tak acuh, sehingga lama kami dijalan karena terhalang ole kendaraan lain yang tidak mau minggir atau tidak mau mengalah, padahal sirinai mobil damkar sudah bunyi kuat, tapi masyarakat tetap saja bandel dan tidak peduli". (Wawancara : Jum'at, 26 Juli 2019 pukul 09.00 WIB).

Kemudian adapun hasil wawancara dengan Bapak Yuli Ardiansyah selaku Komandan Regu Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator Responsibilitas, beliau menjelaskan bahwa :

"Disini istilah sanksi dalam pelaksanaan tugas evakuasi kebakaran tidak kami berlakukan, hanya saja kegagalan evakuasi menjadi bahan evaluasi kinerja petugas pemadam kebakaran. Dari segi responsibilitas, kinerja petugas pemadam kebakaran saya pikir sudah baik. Saran untuk pegawai dalam melaksanakan tugas atau piket, petugas harus beristirahat, karena disaat terjadi kebakaran dibutuhkan stamina yang stabil, jadi dianjurkan untuk setiap anggota yang piket dinas malam atau pun pagi itu harus menjadi stamina agar tetap semangat, tidur yang cukup dan disiplin waktu". (Wawancara : Jum'at, 26 Juli 2019 pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator Responsibilitas, peneliti melihat bahwa dinas pemadam kebakaran sudah membuat laporan dalam pembukuan setiap ada terjadi kebakaran, karena setiap terjadi kebakaran harus dilaporkan secara berkala. Akan tetapi dalam hal pemberian penyuluhan, dinas pemadam kebakaran belum memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak kebakaran, hal ini dikarenakan terbatasnya biaya yang dimiliki oleh dinas

pemadam kebakaran, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi sudah memberikan pelayanan secara professional dan cepat tanggap kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden pegawai pemadam kebakaran melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kabid Pemadam Kebakaran dan Komandan Regu, serta hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Responsibilitas dalam penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan berada pada kategori penilaian Baik.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu merujuk pada kewajiban setiap individu dan kelompok untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Kemudahan prosedur dalam memberikan pelayanan, Pelayanan yang diberikan sudah efektif dan efisien, dan Memenuhi standar kualifikasi dan jumlah petugas operasional pemadam kebakaran yang memadai.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 15 orang responden mengenai indikator Akuntabilitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan, dapat dilihat pada tabel V.10 berikut ini :

Tabel V.10: Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Mengenai Indikator Akuntabilitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kemudahan prosedur dalam memberikan pelayanan	7	8	-	15
2	Pelayanan yang diberikan sudah efektif dan efisien	5	6	4	15
3	Memenuhi standar kualifikasi dan jumlah petugas operasional pemadam kebakaran yang ada sudah memadai	3	7	5	15

Sumber : Data Olahan, 2019.

Selanjutnya untuk mengetahui analisis distribusi tanggapan responden pegawai yang berjumlah 15 orang mengenai indikator Akuntabilitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.11: Analisis Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Mengenai Indikator Akuntabilitas terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
		(3 skor)	(2 skor)	(1 skor)	
1	Kemudahan prosedur dalam memberikan pelayanan	21	16	-	37
2	Pelayanan yang diberikan sudah efektif dan efisien	15	12	4	31
3	Memenuhi standar kualifikasi dan jumlah petugas operasional pemadam kebakaran yang memadai	9	14	5	28
Total Skor					96

Sumber : Data Olahan, 2019.

Skor Tertinggi : $15 \times 3 = 45$

Skor Tertinggi Indikator : $45 \times 3 = 135$

$$\% = \frac{\text{total skor}}{\text{skor tertinggi}} \times 100$$

$$\% = \frac{96}{135} \times 100$$

$$= \frac{9.600}{135}$$

$$= 71\%$$

Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan pegawai Dinas Pemadam Kebakaran terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan dalam indikator Akuntabilitas berada dalam kategori **Baik** dengan persentase 71%. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden pegawai Dinas Pemadam Kebakaran. Sesuai dengan penjelasan diawal tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Baik.

Sementara dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Martono selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator Akuntabilitas, beliau menjelaskan bahwa :

“Hasil kinerja dinas pemadam kebakaran jika ditinjau dari segi Akuntabilitas sudah sangat tinggi, karena pegawai disini sudah sangat bertanggung jawab dengan tugas pekerjaannya. Kemudian adapun saran saya untuk masyarakat agar dapat lebih sadar terhadap bahaya dan dampak dari kebakaran. Kebakaran ini sejatinya adalah musibah, masyarakat harus lebih berhati-hati seperti saat memasak perhatikan benar-benar kompornya, kalau bocor cepat di ganti, listrik kalau gak dirumah ya dimatikan. Apapun yang berhubungan dengan listrik dan yang bisa menimbulkan kebakaran, supaya dijaga bersama agar tidak terjadi kebakaran. Dalam membakar lahan, kalau terjadi kelalaian, bisa menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, karena buka

lahan ada aturannya. Kalau untuk gedung-gedung, masing-masing mereka wajib menyediakan satu APAR, tugas kami hanya memeriksa apakah layak atau tidak. Seharusnya masyarakat itu setiap rumah punya satu APAR, tapi disini rata-rata semua rumah gak ada yang punya APAR. Kemudian idealnya setiap kecamatan seharusnya ada 1 pos, 2 armada, dan 10 orang petugas”. (Wawancara : Jum’at, 26 Juli 2019, pukul 09.00 WIB).

Kemudian adapun hasil wawancara dengan Bapak Yuli Ardiansyah selaku Komandan Regu Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator Akuntabilitas, beliau menjelaskan bahwa :

“Dari segi akuntabilitas, kinerja pegawai pemadam kebakaran sudah baik, mereka semua sudah melakukan tanggungjawabnya dengan baik dan ikhlas. Kemudian secara keseluruhan, hasil kinerja dinas pemadam kebakaran juga sudah cukup baik, selama ini kami selalu berhasil menyelamatkan korban jiwa dalam kebakaran dan setiap terjadi kebakaran selalu terselesaikan dengan baik pegawai serta semua peralatan selalu selamat. Saran saya kepada seluruh petugas agar lebih ditingkatkan lagi kemampuannya, disiplinnya, biar masyarakat tidak kecewa, siap dipanggil kapanpun, karena tugas kami 24 jam. Mau subuh mau kapanpun, pokoknya setiap saat”. (Wawancara : Jum’at, 26 Juli 2019 pukul 09.30 WIB).

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan mengenai indikator Akuntabilitas, peneliti melihat bahwa dinas pemadam kebakaran sudah memberikan kemudahan prosedur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak berbelit-belit, karena itu sudah menjadi kewajiban dinas pemadam kebakaran dalam melayani masyarakat, adapun respon time sesuai standar operasional prosedur yaitu maksimal 15 menit. Akan tetapi untuk jumlah petugas pemadam kebakaran yang ada masih kurang memadai, karena untuk satu armada diperlukan 6 orang petugas operasional, sedangkan dinas pemadam

kebakaran Kuansing hanya memiliki 30 orang petugas pemadam kebakaran dengan armada 7 unit, jadi masih kurang 12 orang petugas pemadam kebakaran.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden pegawai pemadam kebakaran melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kabid Pemadam Kebakaran dan Komandan Regu, serta hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Akuntabilitas dalam penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan berada pada kategori penilaian Baik.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Pegawai Pemadam Kebakaran terhadap penelitian Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan dapat dilihat pada tabel V.12 berikut ini :

Tabel V.12 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai Pemadam Kebakaran Terhadap Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan

No	Variabel	Indikator	Persentase (%)
1.	Kinerja	1. Produktivitas	83%
		2. Kualitas Pelayanan	67%
		3. Responsibilitas	72%
		4. Akuntabilitas	71%
Total			293%
Rata-rata			73%

Sumber : Data Olahan, 2019.

Dari tabel V.12 rekapitulasi tanggapan responden pegawai Pemadam Kebakaran sebanyak 15 orang diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan dikategorikan **Baik** dengan total

persentase sebesar 73%. Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Baik.

Jadi, berdasarkan dari hasil data kuisioner, wawancara, serta observasi penulis dilapangan maka dapat dinyatakan bahwa Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan, secara keseluruhan sudah baik.

Selanjutnya berdasarkan analisis peneliti, produktivitas yang dihasilkan oleh pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi seperti tingkat kemampuan petugas pemadam kebakaran dalam memadamkan api sudah sangat baik, karena petugas pemadam kebakaran pada umumnya telah memiliki sertifikat pemadam yang diperoleh dari diklat. Kemudian selama ini juga belum pernah ada korban jiwa yang terjadi pada kejadian kebakaran yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, semua jiwa yang terancam dalam kejadian kebakaran bisa diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat atau publik, yaitu dengan mengadakan simulasi di sekolah-sekolah, kantor pemerintahan dan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Kuansing yang di agendakan satu bulan sekali. Karena dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dapat mencegah secara dini akan timbulnya kebakaran. Disamping itu, dinas pemadam kebakaran juga sering mendapat kritik dan komplain dari masyarakat yang kecewa dengan kinerja dinas pemadam kebakaran Kuansing. Hal ini disebabkan oleh karena jarak tempuh

yang jauh, sehingga pemadam kebakaran selalu terlambat datang ke lokasi kebakaran.

Disamping itu, Dinas Pemadam Kebakaran juga sudah membuat laporan dalam pembukuan setiap ada terjadi kebakaran, karena setiap terjadi kebakaran harus dilaporkan secara berkala. Akan tetapi dalam hal pemberian penyuluhan, dinas pemadam kebakaran belum memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak kebakaran, hal ini dikarenakan terbatasnya biaya yang dimiliki oleh dinas pemadam kebakaran, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian Dinas Pemadam Kebakaran juga sudah memberikan kemudahan prosedur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak berbelit-belit, karena itu sudah menjadi kewajiban dinas pemadam kebakaran dalam melayani masyarakat, adapun respon time sesuai standar operasional prosedur yaitu maksimal 15 menit. Akan tetapi untuk jumlah petugas pemadam kebakaran yang ada masih kurang memadai, karena untuk satu armada diperlukan 6 orang petugas operasional, sedangkan dinas pemadam kebakaran Kuansing hanya memiliki 30 orang petugas pemadam kebakaran dengan armada 7 unit, jadi masih kurang 12 orang petugas pemadam kebakaran.

C. Faktor Penghambat Analisis Kinerja Organisasi Publik Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi Di Kota Taluk Kuantan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam Analisis Kinerja Organisasi

Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan, yaitu sebagai berikut:

1. Jarak tempuh yang jauh, sehingga pemadam kebakaran selalu terlambat datang ke lokasi kebakaran. Hal ini terjadi karena jumlah pos pemadam kebakaran di Kabupaten Kuantan Singingi hanya ada satu, sementara Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 Kecamatan.
2. Terbatasnya biaya yang dimiliki oleh dinas pemadam kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga dinas pemadam kebakaran belum bisa memberikan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi mengenai bahaya dan dampak terjadinya kebakaran.
3. Jumlah petugas pemadam kebakaran yang ada di dinas pemadam kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang memadai. Petugas yang ada hanya 30 orang, dengan jumlah armada 7 unit. Sedangkan untuk satu armada membutuhkan 6 orang petugas, sehingga masih kekurangan 12 orang petugas Damkar di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan, banyak yang telah peneliti temui berdasarkan observasi langsung ke lapangan, wawancara dan kuisisioner yang telah peneliti berikan kepada seluruh responden yang diperlukan dengan empat indikator yaitu Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Maka dari itu peneliti telah menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dari seluruh jawaban responden pada indikator variabel Produktivitas dikategorikan Baik, karena petugas pemadam kebakaran pada umumnya sudah memiliki sertifikat pemadam yang diperoleh dari Diklat.
2. Dari seluruh jawaban responden pada indikator variabel Kualitas Pelayanan dikategorikan Baik, karena Dinas Pemadam Kebakaran sudah mengadakan sosialisasi dan simulasi di sekolah-sekolah dan kantor pemerintahan yang ada di Kabupaten Kuansing satu bulan sekali.
3. Dari seluruh jawaban responden pada indikator variabel Responsibilitas dikategorikan Baik, karena petugas Damkar sudah cepat tanggap dan tetap langsung gerak menuju lokasi kebakaran walaupun tidak ditelpon warga.
4. Dari seluruh jawaban responden pada indikator variabel Akuntabilitas dikategorikan Baik, karena Dinas Pemadam Kebakaran juga sudah memberikan kemudahan prosedur dalam melayani masyarakat dan tidak berbelit-belit, dengan *respon time* maksimal 15 menit.

5. Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan berada pada kategori penilaian Baik.
6. Faktor penghambat dalam Analisis Kinerja Organisasi Publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi di Kota Taluk Kuantan adalah sebagai berikut :
 - 1) Jarak tempuh yang jauh, sehingga pemadam kebakaran selalu terlambat datang ke lokasi kebakaran. Hal ini terjadi karena jumlah pos pemadam kebakaran di Kabupaten Kuantan Singingi hanya ada satu, sementara Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 Kecamatan.
 - 2) Terbatasnya biaya yang dimiliki oleh dinas pemadam kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga dinas pemadam kebakaran belum bisa memberikan penyuluhan / sosialisas kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi mengenai bahaya dan dampak terjadinya kebakaran.
 - 3) Jumlah petugas pemadam kebakaran yang ada di dinas pemadam kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi masih kurang memadai. Petugas yang ada hanya 30 orang, dengan jumlah armada 7 unit. Sedangkan untuk satu armada membutuhkan 6 orang petugas, sehingga masih kekurangan 12 orang petugas Damkar di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan faktor penghambat pada hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menambah jumlah pos pemadam kebakaran di beberapa titik yang padat penduduk, karena di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 Kecamatan. Jika terus bertahan dengan 1 pos, maka kinerja Damkar tidak akan bisa optimal dan efektif.
2. Seharusnya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menambah anggaran untuk dinas pemadam kebakaran, agar dinas pemadam kebakaran bisa memberikan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi mengenai bahaya dan dampak terjadinya kebakaran.
3. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi harus menambah personil Damkar, setidaknya menambah 12 orang. Karena petugas yang ada sekarang hanya 30 orang, dengan jumlah armada 7 unit. Sedangkan untuk 1 armada membutuhkan 6 orang petugas pemadam kebakaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Ma'ruf. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Adisubrata, Winarya Surya, 2002. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Ali, Faried, 2014. *Ilmu Administrasi*, Makasar: PT Refika Aditama.
- Amirullah, Haris, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andry, Hendry. 2015. *Perilaku Dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: MarpoyanTujuh Publishing.
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Darwis, dkk, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Riau.
- Fahmi, Irham, 2015. *Manajemen Kinerja*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Effendi, Usman, 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Grafindo Pustaka.
- Hamim, Sufian, 2005. *Administrasi, Organisasi, Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Hamim, Sufian, 2014. *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*. Pekanbaru: UIR Press.
- Hasibuan, Melayu, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaswan dan Akhyadi, Ade Sadikin, 2015. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2013. *Etika Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta.
- Mardalis, 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Moehariono, 2012. Indikator Kinerja Utama (IKU). Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mulyasa, 2006. Kinerja Pegawai Dalam Organisasi Modern. Jakarta: Rajawali Press.
- Mulyadi, Deddy. 2015. Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung: Alfabeta, cv.
- Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Pasolong, Harbani. 2016. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Riva'i, Veithzal. 2005. Sistem Yang Tepat Menilai Kinerja Karyawan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samsudin, Sadili, 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia
- Sedarmayanti, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti, 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, Sondang. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Payaman. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: FE UI.
- Sinambela, Poltak. Lijan. 2012. Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sjafrizal. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarmanto, 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Dalam Organisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Administratif. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Surjadi, H. 2009. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Malang: PT. Refika Aditama.

Syafri, Wirman. 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Tim Penyusun. 2013. Buku Pedoman Penulisan Penelitian. Pekanbaru: UIR Badan Penerbit FISIPOL.

Zulkifli dan Nurmasari. 2015. Pengantar Manajemen. Pekanbaru: MarpoyanTujuh Publishing.

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kantor Satuan Pamong Praja Sebagai Pegawai Pemadam Kebakaran Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kuantan Singingi.